

**MENAKAR NETRALITAS DAN INDEPENDENSI
MEDIA MASSA TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK
(Studi Kasus Surat Kabar Palopo Pos dan Koran Seru!YA)**



IAIN PALOPO

Oleh:

**LINDA MUSTIKA
NIM 12.16.6.0011**

Pembimbing:

- 1. Dr. H. Muhazzab Said, M.Si.**
- 2. Achmad Sulfikar, S.Sos., M.I.Kom.**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2018**

**MENAKAR NETRALITAS DAN INDEPENDENSI
MEDIA MASSA TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK
(Studi Kasus Surat Kabar Palopo Pos dan Koran Seru!YA)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin,
Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh:

**LINDA MUSTIKA
NIM 12.16.6.0011**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2018**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Linda Mustika

NIM : 12.16.6.0011

Program studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 11 April 2018

yang membuat pernyataan

LINDA MUSTIKA
NIM 12.16.6.0011

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Menakar Netralitas Dan Independensi Media Massa Terhadap Kebijakan Publik (Studi Kasus Surat Kabar Palopo Pos dan Koran Seru!YA)** yang ditulis oleh Linda Mustika Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 12.16.6.0011, mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 16 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan 28 Jumadil Akhir 1439 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

2018 M

1439 H

Palopo, 05 April

19 Rajab

Tim Penguji

1. Dr. Efendi P., M.Sos.I. Ketua Sidang
(.....)
2. Dr. H.M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. Sekretaris Sidang
(.....)
3. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I. Penguji Utama
(.....)
4. Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. Penguji Pendamping
(.....)
5. Dr. H. Muhazzab Said, M.Si. Pembimbing I
(.....)

6. Achmad Sulfikar, S.Sos., M.I.Kom.

Pembimbing II

(.....)

Rektor IAIN Palopo

Dakwah

Mengetahui,

Dekan Fakultas
Ushuluddin, Adab, dan

Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
NIP 19691 104 199403 1 004
1 009

Dr. Efendi P., M.Sos.I.
NIP 19651 231 199803

PRAKATA

□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa kita ucapkan atas berkat rahmat Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, atas limpahan rahmat dan ridho- Nya sehingga skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan. Selawat kepada nabi Muhammad saw. yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita.

Penyusunan skripsi yang berjudul “Menakar Netralitas Dan Independensi Media Massa Terhadap kebijakan Publik (Studi Kasus Surat Kabar Palopo Pos dan Koran Seru!YA), tidak terlepas dari hambatan yang dihadapi oleh penulis. Namun, berkat dorongan dan motivasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat selama penyusunan skripsi ini yang telah banyak memberikan sumbangsi baik tenaga, waktu, finansial maupun pikiran, terkhusus untuk kedua orang tua ibu yang terkasih Sukinah (almarhumah) dan bapak Senaruddin atas doa dan motivasi yang diberikan. Oleh karena itu, Skripsi ini penulis dedikasikan untuk mereka. Suharma dan adik-adikku yang senantiasa menjadi salah satu motivasi penulis serta seluruh keluarga. Semoga mereka senantiasa dalam lindungan Allah. Kepada yang terhormat:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I Dr. Rustan S, M.Hum, Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M., dan Wakil Rektor III Dr. Hasbi,M.Ag., yang senantiasa membina dan mengembangkan perguruan tinggi tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan.
2. Dr. Efendi, M.Sos.I., Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Dr. H.M Zuhri Abu Nawas ,Lc.,M.A., Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Dr. Adilah Mahmud, M.Sos.I., Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Dr. H. Haris Kulle, Lc. M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah.
3. Dr. H. Muhazzab Said, M.Si., Pembimbing I dan Achmad Sulfikar, S.Sos., M.I.Kom., selaku pembimbing II sekaligus ketua prodi Komunikasi dan penyiaran Islam yang dengan sabar membina, mengasah dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi.
4. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I., Penguji I dan Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A., selaku penguji II yang bersedia meluangkan waktu untuk menjadi penguji dari skripsi penulis.
5. Dr. Masmuddin, M.Ag., Kepala Perpustakaan IAIN Palopo beserta para staf yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam menyediakan referensi yang berkaitan dengan tugas perkuliahan dan penyusunan skripsi.
6. Bapak dan ibu dosen IAIN Palopo yang telah mentransfer ilmu dan nilai kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
7. Direktur ,staf dan karyawan dari Palopo Pos dan seru!YA yang telah bersedia bekerjasama dalam membantu memberikan informasi selama penelitian penulis.
8. Wahyuni Husain, M.Kom.I. dan Alimuddin, M.Pd.I. yang bersedia meluangkan waktu untuk menjadi Coder dari penelitian penulis`

9. Seluruh staf Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah membantu penulis dalam hal administrasi.
10. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) tempat penulis diasah, diasih dan diasuh serta mendapatkan pengalaman yang menjadi sejarah. Kakanda Firman Patawari, M.Pd., kakanda Asrul, S.Pd.I. sekeluarga, kakanda Muhammad Yusuf, S.Ud., M.Pd.I. sekeluarga, kakanda Jumasri, S.Pd., kakanda NurSyamsi, S.E., kakanda Sukri, S.Ud., kakanda Muh. Idris, S.Pd., kakanda Taslim, M.Pd.I. sekeluarga, kakanda Dr. Hadi Pajarianto, M.Pd.I. sekeluarga, kakanda Syahrudin, ST., kakanda Kholik, S.Pd.I. sekeluarga, kakanda Muh. Akbar, S.E.Sy. sekeluarga, dan kakanda yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu. Saudara dan saudari seperjuangan PC. IMM 2016-2017 Ahmad Rifki Saputra, S.E., NurAfni, S.E., Uswatun Hasanah, S.Pd., Asdar, S.E., Husaifah, Ramadhan, S.Pd., Fatimah H.D., S.Pd.I., Juhani Jupa, A.Md.Keb., Helna, S.Pd., Titi Yuniarti, Sonne Pasulle, Muhammad Iqbal, S.E., Maulana Achsan, S.E. (almarhum), Risna, A.Md.Keb., Sabariah, Nur Jannah, S.E., Riskawanti, S.Sos., Husna, Kaharuddin, S.E., Muhammad Dafit, Abdul Kahar, S.Pd., Delia Amanda, semoga mereka menjadi orang-orang yang sukses dunia-akhirat serta senantiasa dalam lindungan Allah. Adinda-adinda PK. IMM Syafii Maarif, PK. IMM Buya Hamka, PK. IMM Din Syamsuddin IAIN Palopo, PK. IMM Akuntansi, PK. IMM Maniespa dan PK. IMM Iqtishad Masamba, semoga senantiasa menjadi generasi tercerahkan dan mencerahkan serta pengurus masjid Al Awwabin Muhammadiyah tempat yang telah membesarkan penulis diperantauan semoga senantiasa menjadi Istana Pencerahan.

11. Teman-teman seperjuangan KPI angkatan 2012 Hasna, S.Sos., A. Ummu Fadhilah, S.Sos., Almaidah P., S.Sos., Sulasmi, S.Sos., Aminullah, S. Sos., Nisa'ul Hasanah, S.Sos., Hamka, Eki Darmawan, Uliati, Rian Mardin, Muhtadin Wahid, St. Aisyah, Asdar P., Yusma, dan teman-teman yang tidak sempat penulis sebutkan. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam memberikan informasi dan menjadi referensi bagi para akademis. Dalam penyusunan skripsi ini, tentu jauh dari kesempurnaan. Olehnya, dibutuhkan kritik yang membangun dan saran yang solutif demi perbaikan penulis dan penelitian selanjutnya.

Palopo, 31 Maret 2018
Penulis,

LINDA MUSTIKA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING I.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING II.....	vi
NOTA DINAS PENGUJI I.....	vii
NOTA DINAS PENGUJI II.....	viii
SURAT PERNYATAAN.....	ix
PRAKATA.....	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penulisan.....	8
E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
B. Kajian Pustaka.....	14
1. Pengertian Media Massa.....	14
2. Pengertian Independensi dan Netralitas.....	17
3. Prinsip Independensi dan Netralitas dalam Jurnalisme dan Jurnalistik.....	17
4. Indikator Independensi dan Netralitas.....	20
5. Pengertian Kebijakan publik.....	27
C. Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
C. Sumber Data.....	32
D. Subjek Penelitian.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33

1. Studi Pustaka.....	33
2. Analisis Isi Berita.....	33
a) Penggunaan Unit Analisis.....	37
b) Penarikan Sampel.....	38
c) Konseptualisasi dan Operasionalisasi.....	38
d) Lembar Coding (<i>Coding Sheet</i>).....	40
3. Wawancara Mendalam.....	40
4. Observasi.....	40
F. Teknik Pengolahan.....	40
G. Analisis Data.....	41
H. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	42
1. Upaya Yang Dilakukan Oleh Palopo Pos dan Seru!YA Menjadi Media Yang Netral Dan Independen.....	47
2. Hambatan- Hambatan Palopo Pos Dan Seru!YA Menjadi Media Yang Netral Dan Independen.....	48
3. Efek Yang Ditimbulkan Menjadi Media Yang Netral Dan Independen Terhadap Keberlangsungan Hidup Perusahaan Dan Wartawan.....	49
B. Pembahasan.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA.....	63
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Berita yang mengandung Unsur Opini

Tabel 2.1 Berita yang mengandung Unsur Personalisasi

Tabel 3.1 Berita yang mengandung Unsur Sensasionalisme

Tabel 4.1 Berita yang mengandung Unsur Stereotype

Tabel 5.1 Berita yang mengandung Juxtaposition atau Linkage

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori

Gambar 3.1 Tahapan Analisis Isi

Gambar Lampiran

Gambar 1 wawancara dengan wartawan dari Seru!YA

Gambar 2 wawancara dengan redaktur dari Seru!YA

Gambar 3 wawancara dengan wartawan dari Palopo Pos

Gambar 4 wawancara dengan Pimpinan Redaksi Palopo Pos

Gambar 5 wawancara dengan pimpinan Redaksi Seru!YA

Gambar 6 wawancara dengan wartawan/ bagian pemasaran palopo Pos

DAFTAR LAMPIRAN

Surat permohonan izin penelitian

Surat keterangan meneliti dari Palopo Pos

Surat keterangan meneliti dari Seru!YA

Format pedoman wawancara penelitian

Format Protokol lembar *coding*

Format Lembar *coding* (coding sheet)

Keterangan wawancara

Kutipan

Berita –berita kebijakan publik

ABSTRAK

Linda Mustika, 2018: Menakar Netralitas Dan Independensi Media massa Terhadap Kebijakan Publik (Studi Kasus Surat Kabar Palopo Pos dan Koran Seru!YA). Skripsi, Strata satu Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, Pembimbing (I) Dr. H. Muhazzab Said, M.Si., (II) Achmad Sulfikar, S.Sos., M.I.Kom.

Kata kunci: Netralitas, Independensi, Media Massa, Kebijakan Publik.

Netralitas dan independensi media massa nampaknya tidak bisa dikesampingkan bahkan menjadi prioritas utama yang harus diimplementasikan oleh media massa. Mengingat eksistensi keberadaan media massa dalam hal ini media cetak bagi publik terlebih kepada kaum tertindas memiliki peran sebagai kontrol sosial serta penyambung aspirasi masyarakat dalam menanggapi kebijakan – kebijakan pemerintahan. Palopo Pos dan Seru!YA adalah dua media cetak lokal tetap berupaya untuk menjadi media yang netral dan independen.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni: *Pertama*, Bagaimana Palopo Pos dan Seru!YA berupaya menjadi media yang netral dan independen dalam menyajikan sebuah berita? *Kedua*, hambatan- hambatan yang dihadapi media cetak Palopo Pos dan Seru!YA dalam upayanya menjadi media yang netral dan independen. *Ketiga*, efek yang ditimbulkan ketika media cetak Palopo Pos dan Seru!YA berupaya menjadi media yang netral dan independen terhadap keberlangsungan hidup perusahaan dan wartawan.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan sejauh mana media cetak Palopo Pos dan SeruYA bersikap netral dan independen dalam menyajiakan informasi mengenai kebijakan publik. Jenis penelitian yang digunakan adalah *mix method* yakni kuantitatif melalui Analisis isi. Analisis ini dilakukan melalui pengkodean terhadap isi berita dari surat kabar kedua media cetak tersebut, dan penelitian kualitatif menggunakan triangulasi. Kedua metode tersebut menggunakan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian yang mengacu pada rumusan masalah menunjukkan bahwa: *Pertama*, Upaya yang dilakukan Palopo Pos dan Seru!ya masing –masing berupaya dengan cara tersendiri dalam hal menjadi media yang netral dan independen. Keduanya tetap menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial dan menyampaikan informasi kepada masyarakat serta tergantung visi- misi didirikan media cetak tersebut. *Kedua*, Hambatan yang didapatkan untuk menjadi media yang netral dan independen yakni terkadang terjadi *missunderstanding* antara narasumber (mitra) dan wartawan atau perusahaan, komplain masyarakat terhadap berita yang diterbitkan tidak sesuai dengan perspektif masyarakat. *Ketiga*, Efek yang ditimbulkan dari upaya yang dilakukan kedua media cetak tersebut untuk menjadi media yang netral dan independen terhadap keberlangsungan hidup

wartawan dan perusahaan yakni perusahaan dan wartawan sulit untuk sejahtera. Karena, secara harfiah tidak ada media cetak yang independen. Media tersebut mesti menjalin kerjasama seperti, menerima iklan, kontrak dengan instansi atau lembaga baik pemerintahan maupun swasta dalam memperoleh pendapatan untuk gaji para wartawan dan karyawan perusahaan. Akan tetapi, agar tetap mendapat kepercayaan dari pembaca, media cetak meski menggunakan peluang tersebut secara bijak dalam artian di samping menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, media cetak tetap harus menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif islam, apabila mendapat informasi yang belum jelas kronologinya, maka hendaknya menyelidiki isu atau informasi tersebut hingga benar- benar jelas. Karena bisa saja informasi tersebut bersifat *hoax*¹ sehingga, merugikan diri sendiri dan orang lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Quran: Q.S. Al Hujurat/49: 06

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا
قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

:Artinya

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Demikianlah yang tercantum dalam kalamullah, yang telah mengingatkan manusia agar mengembangkan sikap kritis terhadap informasi sekaitan dengan berbagai fenomena yang terjadi baik bagi setiap makhluk individu maupun sebagai lembaga yang berperan sebagai control social dalam rangka mencegah munculnya bencana akibat stereotype dan informasi yang tidak aktual.

Keberadaan media massa dalam menyajikan informasi cenderung memicu perubahan serta banyak membawa pengaruh pada penetapan pola hidup

¹ Hoax atau pemberitaan palsu adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah- olah benar adanya.

masyarakat. Media massa baik media cetak dan elektronik serta media internet (*cyber media/online media*), secara perlahan menarik masyarakat ke suatu pola budaya yang baru dan mulai menentukan pola pikir serta budaya perilaku masyarakat. Tanpa disadari media massa telah ikut mengatur jadwal hidup kita serta menciptakan sejumlah kebutuhan. Pemahaman ini dapat kita lihat melalui informasi yang disajikan oleh media massa misalnya, media massa elektronik dalam hal ini televisi. Dunia pertelevisian sering kali menayangkan film dalam genre berbagai budaya misalnya Batak dalam film Naga Bonar jadi 2, dimana dalam film tersebut tergambar bagaimana dialek dan sikap serta perilaku etnis batak ketika berada di tanah perantauan yang memiliki nasib baik. Hal ini yang membentuk pola pikir masyarakat bahwa, jika orang Batak merantau di Jakarta maka kebanyakan akan sukses.²

Namun, ibarat dua sisi mata pisau, media massa dalam menyajikan beragam informasi dinilai dapat memberi pengaruh yang berwujud positif dan negatif. Secara perlahan namun efektif, media membentuk pandangan masyarakat terhadap bagaimana seseorang melihat pribadinya dan bagaimana seseorang seharusnya berhubungan dengan dunia sehari-hari.

Salah satu kajian yang kerap kali diperbincangkan terkait dengan keberadaan media massa adalah netralitas dan independensi dari media massa dalam menyampaikan informasi. Perbincangan ini, biasanya semakin marak dan hangat terutama ketika ada momentum seperti pemilihan umum, apalagi jika mengingat bahwa pemilik media massa seringkali terlibat langsung sebagai

²Filosa Gita Sukmono dan Fajar Junaedi, *Komunikasi Multikultural: Melihat Multikulturalisme dalam Genggaman Media*, (Cet. II; Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014), h. 8.

kandidat yang akan dipilih. Hal ini tidak bisa dianggap remeh. Mengingat informasi yang disampaikan media massa sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat.

Di negara demokrasi yang sudah maju, isu konvergensi menyebabkan bidang media massa diwajibkan tunduk pada pengaturan tentang kepemilikan silang yang berasaskan kepada keterbukaan dan pembatasan kepemilikan di bidang yang berkonvergensi. Pembatasan ini dilakukan karena pemberitaan menggunakan ranah publik seperti penggunaan frekuensi untuk menyiarkan konten berita melalui stasiun televisi maupun radio harus memperhatikan kepentingan publik pula. Di pihak lain, pemilihan umum merupakan subyek tersendiri untuk diatur karena menyangkut kepentingan yang berskala nasional sehingga negara-negara maju memberikan pembatasan yang ketat terhadap iklan dan pemberitaan kegiatan maupun persiapannya demi independensi dan netralitasnya³. Selain itu, netralitas dan independensi media massa menjadi elemen penting dalam menjalankan profesi tersebut.

Namun, bagaimana dengan realitas saat ini. Kurangnya pengaplikasian dari nilai-nilai independensi dan sembilan elemen jurnalisme oleh media massa. Apalagi banyak media massa yang berkembang maju dilatarbelakangi oleh sponsor- sponsor yang memiliki tendensi pribadi. Belum lagi kebutuhan perusahaan dan para wartawan serta persaingan antar media massa, menjadi salah satu faktor kurangnya netralitas dan independensi mediamassa.

³Amir Efendi Siregar dkk., *Jurnal Dewan Pers: Mengungkap Independensi Media*, (Edisi no. 09. Cet. 1; Jakarta: Dewan Pers, 2014), h. IX.

Dalam penyajian informasi dalam hal ini media cetak, kerap kali jauh dari sikap *ballance* dan tidak komprehensif serta jauh dari fakta. Bahkan, penyajian informasi disajikan sesuai *background* media massa atau dengan kata lain, siapa pemilik media massa tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa walaupun jumlahnya tidak banyak namun secara kualitatif membela kepentingan pemiliknya. Ini menunjukkan bahwa media-media yang dimiliki oleh elit politik cenderung digunakan pemilik untuk kepentingan pribadinya dibandingkan melayani publik. Televisi, koran dan berita *online* yang pemiliknya memiliki kepentingan politik, iklan-iklan politik yang muncul cenderung didominasi oleh wajah pemilik sendiri dan kelompok atau partai politik yang menjadi afiliasinya.

Kecenderungan pemilik media yang mempergunakan medianya sendiri untuk beriklan rawan manipulasi, terutama menyangkut laporan pendapatan perusahaan dan setoran pajak.⁴ Wajar saja, ketika para khalayak ditanya perihal netralitas dan independensi media massa, kebanyakan beranggapan hal itu mustahil akan terjadi.

Netralitas dan independensi media massa nampaknya tidak bisa dikesampingkan bahkan menjadi prioritas utama yang harus diimplementasikan oleh media massa. Mengingat eksistensi keberadaan media massa dalam hal ini media cetak bagi publik terlebih kepada kaum tertindas memiliki peran sebagai kontrol sosial serta penyambung aspirasi masyarakat dalam menanggapi kebijakan – kebijakan pemerintahan. Salah satu contoh dari sekian banyak media massa yakni media cetak dalam hal ini Harian Palopo Pos dan Koran Seru!YA. Kedua

⁴Amir Efendi Siregar dkk., *Jurnal Dewan Pers*, h. x.

media cetak tersebut merupakan media cetak yang cukup jelas keberadaannya dibandingkan dengan media cetak lain yang ada di kota Palopo. Palopo Pos merupakan surat kabar harian yang didirikan pada tahun 2001 dinaungi oleh Jawa Pos. Pada pertengahan kariernya, Palopo Pos mengalami insiden sebagai efek dari dinamika pemilu pada tahun 2013 di kota Palopo. Palopo Pos dalam memainkan perannya sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan publik dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat kita lihat melalui seberapa sering surat kabar tersebut mengangkat pemberitaan mengenai kebijakan –kebijakan pemerintah pada periode Januari – Maret 2017. Pada bulan Januari mengangkat sebanyak 7 kebijakan publik. Sementara pada bulan Februari sebanyak 31 pemberitaan sedangkan pada bulan Maret sebanyak 14 pemberitaan.

Media cetak yang kedua yakni koran Seru!YA terbit pertama kali pada tanggal 20 Juli 2015 dinaungi oleh PT. Wisnu Aditya Intermedia Palopo. Tiga tahun Seru!YA cukup aktif mengawal dinamika yang terjadi baik dalam lingkup masyarakat maupun pemerintahan. Berdasarkan data yang diperoleh, koran Seru!YA memberitakan kebijakan publik periode Januari- maret 2017 yakni sebanyak 16 pemberitaan. Dimana pada bulan Januari mengangkat 9 pemberitaan dan bulan Februari dari 12 surat kabar, tidak terdapat pemberitaan mengenai kebijakan publik sedangkan pada bulan Maret dari 14 surat kabar sebanyak 7 berita.

Kedua media cetak tersebut merupakan media cetak yang cukup bergeming di kota Palopo. Dalam menjalankan perannya sebagai kontrol sosial, Palopo Pos dan Seru!YA mesti membuktikan dalam aksi konkrit. Selain itu, berupaya menjadi media yang netral dan independen dalam menyajikan berita kebijakan publik. Salah satu contoh dari berita mengenai kebijakan publik yakni,

dalam bidang kesehatan. Kota Palopo di bawah pemerintahan H. M. Judas Amir-Ahmad Syarifuddin (JA- Ome) telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dituangkan dalam bentuk program-program. Salah satu program dari pemerintah tersebut yakni, pembagian BPJS kesehatan secara gratis bagi seluruh masyarakat kota Palopo. Hal ini dibuktikan melalui pemberitaan media cetak Palopo Pos dan Seru!YA yakni, dalam menyukseskan program tersebut pemerintah melakukan pendataan berulang kali. Upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh masyarakat kota Palopo memiliki kartu BPJS tersebut.

Terbit sebagai koran harian, tentu memiliki banyak tantangan. Teknologi membantu menurunkan biaya produksi. Monopoli terhadap koran lokal bisa menyesuaikan tarif iklannya tanpa banyak penentangan dari pemasang.⁵ Berbagai macam usaha yang dilakukan untuk tetap eksis meski sering dijadikan sebagai bisnis. Akhirnya surat kabar/koran memasuki dunia internet. Koran memasuki dunia internet pada 1990-an dengan membuat situs berita. Pelan- pelan, koran menjual ruang online untuk pengiklan yang mungkin sudah beriklan di edisi cetaknya.⁶ Hal ini, belum bisa menjamin keberlangsungan perusahaan, mengingat banyak perusahaan yang memiliki situs yang berdaya saing.

Dewasa ini, masyarakat tidak lagi repot untuk *up date* informasi baik lokal maupun nasional. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Didukung dengan berbagai kesibukan sebagian masyarakat, membuat surat kabar jarang dilirik. Disinilah salah satu tantangan untuk tetap menarik bagi masyarakat ditengah IT(*Information and Technology*) yang semakin

⁵John Vivian, *Teori Komunikasi Massa*, (Edisi ke VIII. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2008), h. 90.

⁶John Vivian, *Teori Komunikasi Massa*, h. 93.

maju. Dinamika dalam mempertahankan eksistensi media cetak tersebut, sering kali mempengaruhi sejauh mana netralitas dan independensi dapat dipertahankan. Netralitas dan independensi merupakan prinsip yang harus dijalankan apabila media tersebut ingin baik dari segi kualitas. Dengan demikian, perlu dikaji secara mendalam perihal netralitas dan independensi media cetak surat kabar Palopo Pos dan Seru!YA.

Berangkat dari latar belakang yang diuraikan oleh penulis maka, judul yang akan dibahas yakni “ *Menakar Netralitas dan Independensi Media Massa Terhadap Kebijakan Publik*”(Studi kasus surat kabar Palopo Pos dan Seru!YA).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, sehingga dapat menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Palopo Pos dan Seru!YA berupaya menjadi media yang netral dan independen dalam menyajikan berita kebijakan publik?
2. Hambatan- hambatan apa yang dihadapi media cetak Palopo Pos dan Seru!YA dalam upayanya menjadi media yang netral dan independen?
3. Apa efek yang ditimbulkan ketika media cetak Palopo Pos dan Seru!YA berupaya menjadi media yang netral dan independen terhadap keberlangsungan hidup perusahaan dan wartawan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor sebagai jawaban yang berkaitan dengan rumusan masalah yakni :

1. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh Palopo Pos dan Seru!YA menjadi media yang netral dan independen

2. Mengetahui hambatan – hambatan yang dihadapi Palopo Pos dan Seru!YA dalam upayanya menjadi media yang netral dan independen
3. Mengetahui efek yang ditimbulkan dalam upayanya menjadi media yang netral dan independen terhadap keberlangsungan hidup perusahaan dan wartawan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat berupa:

1. Dari sisi praktis memberikan gambaran dan masukan mengenai sikap yang harus diambil ketika terjadi benturan kepentingan antara visi jurnalisme ideal dengan kebutuhan praktis pekerjaan.
2. Dari sisi akademis diharapkan memberikan sumbangan bagi penelitian-penelitian media dan jurnalisme secara khusus di Kota Palopo.

E. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian

Definisi Operasional (DO) adalah penjelasan mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini, karena antarpeneliti satu dengan yang lain bisa saja memiliki definisi yang berbeda meski judul penelitian sama. Selain itu, Defini Operasioanl bermanfaat bagi peneliti untuk menentukan batasan dan tetap fokus pada kajian penelitian. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahfahaman terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menganggap perlu adanya Defini Operasional. Penjelasan dari variabel penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Menakar Netralitas dan Independensi Media Massa

Menakar adalah mengukur dengan menggunakan alat ukur yang telah ditentukan oleh peneliti. Alat ukur yang digunakan yakni melakukan pengcodingan terhadap isi berita dengan ditentukan beberapa kategori dan dituangkan ke dalam lembar *coding* untuk mengukur sejauh mana netralitas dan independensi suatu berita.

Netral dalam hal ini wartawan berimbang dan tidak memihak kepada pihak manapun baik pada saat melakukan peliputan berita maupun penulisan berita.

Independensi adalah sikap bebas, merdeka atau tidak terikat oleh pihak manapun serta bebas dari pihak manapun. Meski demikian, bebas, merdeka yang dimaksud adalah berpihak pada kebenaran berdasarkan agama dan hukum. Independen yang dimaksud oleh penulis tidak hanya dari segi harfiah saja (bahasa) namun, independen yang dimaksud adalah bebas atau merdeka dari pihak yang memiliki tendensi tertentu sekaitan dengan suatu peristiwa dan penerbitan berita yang merugikan masyarakat dan melanggar kode etika jurnalistik serta undang-undang pers.

Media massa adalah saluran yang digunakan untuk menyebarkan informasi ke halayak secara massiv baik melalui media cetak maupun elektronik. Dalam penelitian ini, media massa lokal cetak yakni Harian Palopo Pos dan Koran Seru! YA.

Jadi, sebagai kesimpulan menakar netralitas dan independensi media massa adalah mengukur sejauh mana sikap berimbang, bebas dan merdeka yang diambil oleh seorang jurnalis dan lembaga pers dalam meliput dan menyajikan sebuah berita berdasarkan kode etik Jurnalis dan undang-undang pers.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang dikeluarkan baik berupa program- program maupun peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang dengan tujuan kesejahteraan masyarakat dan negara atau lingkungan tertentu. Kebijakan publik yang dimaksud dalam penelitian ini, segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Palopo baik berupa program kerja maupun perundang – undangan mulai dari bidang politik, ekonomi, sosial dan kesehatan.

3. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah pemberitaan media massa dalam hal ini surat kabar Palopo Pos dan Seru!YA, wartawan, mahasiswa, serta pelanggan dari kedua media cetak tersebut.

BAB II **KAJIAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis dalam penelusurannya mendapatkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yakni :

1. Amir Efendi Siregar dkk. Dari jurnal Dewan Pers melakukan penelitian Menakar Netralitas dan Independensi Media Massa di Indonesia. Penelitian tersebut memfokuskan penelitian terhadap objektivitas, netralitas, pemberitaan politik dan pemilik dari media massa tersebut. Dimana penelitian tersebut menggunakan tehnik triangulasi.¹
2. Annet Keller, yang diterbitkan oleh FES (Friedrich Ebert Stiftung) Indonesia Office di mana, dalam penelitian Annet mengenai Otonomi Redaksi terhadap empat media cetak nasional yakni *Tempo, Kompas, Republik dan Media Indonesia*. Selain itu, keempat media cetak tersebut memiliki otonomi redaksi yang berbeda-beda dalam menginvestigasi kasus-kasus yang diberitakan. Desain penelitian Annet kualitatif dengan memperhatikan berdasarkan bentuk perusahaan, budaya perusahaan dan peranan penerbit.²
3. Diana Patricia Manulong meneliti tentang “Representasi Agenda Media Dalam Surat Kabar Nasional” dalam rangka penyusunan skripsi di Universitas Indonesia. Diana meneliti sejauh mana perhatian media massa Indonesia dengan mengangkat dua media cetak nasional yakni *Kompas* dan

¹Amir Efendi Siregar dkk.,*Jurnal Dewan Pers: Mengungkap Independensi Media*,(Edisi no. 09. Cet. 1; Jakarta: Dewan Pers, 2014).

²Annet Keller, *Tantangan Dari Dalam (Otonomi Redaksi di 4 Media Cetak Nasional: Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika)*,(ed. 1; Jakarta: 2009).

koran Tempo dalam pemberitaan mengenai isu lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dengan kesimpulan penelitian bahwa, surat kabar di Indonesia belum memberikan perhatian kepada isu- isu lingkungan dan representasi lingkungan masih sangat terbatas pada isu- isu tertentu yang menarik dan berdampak besar kepada khalayak.³

4. Eko Kurniawan. Penelitian yang dilakukan Eko dengan judul “ Studi Analisis Isi Pemberitaan Media Massa Tentang Lingkungan Hidup Dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Di Kabupaten Bangka” dalam rangka penyusunan disertasi di universitas Diponegoro Semarang ini, oleh tiga media cetak lokal yang menjadi objek penelitian yakni, Bangka Pos, Babel Pos dan Rakyat Pos. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bangka pos lebih intensif dalam memberitakan tentang isu lingkungan dibandingkan dengan kedua media cetak yang telah disebutkan. Hal ini terlihat pada perbedaan frekuensi yang dihasilkan dari penelitian. Sedangkan implikasi pada aspek kontrol sosial yakni terbukanya ruang untuk kritik, input dan tuntutan kebijakan.⁴
5. Penelitian yang dilakukan oleh Novian Panji Sawung Jiwarka Subagyo dengan judul “ Keberpihakan Media Massa” di Universitas Sebelas Maret

³Dian Patricia, *Skripsi: Representasi Agenda Media Dalam Surat Kabar Nasional (Sebuah analisis isu lingkungan dalam KOMPAS dan koran TEMPO)*, (Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Depok; Universitas Indonesia, 2012).

⁴Eko Kurniawan, *Tesis: Studi Analisis Isi Terhadap Pemberitaan Media Massa Tentang Lingkungan Hidup Dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Di Kabupaten Bangka*, (Program Magister Ilmu Lingkungan, Semarang; Universitas Diponegoro, 2006).

Surakarta. Di mana penelitian tersebut membahas mengenai kasus yang terjadi antara Hary Tanoe dan Surya Paloh di mana masing – masing menaungi media cetak nasional yakni SINDO (Hary Tanoe) dan Media Indonesia (Surya Paloh). Dalam penelitian tersebut, Panji melihat konflik yang terjadi antara kedua tokoh melalui metode analisis *framing*, dalam artian dilihat dari bingkai masing media cetak yang dinaungi oleh tokoh tersebut. Bagaimana konflik tersebut di beritakan.⁵

Berdasarkan hasil analisis dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa, penelitian yang dilakukan oleh Amir Efendi, Annet dan Novian Panji, memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian ini. Di mana kedua penelitian tersebut, masing- masing memiliki fokus pembahasan yang berbeda dan tidak menjelaskan mengenai kebijakan publik secara gamblang. Sementara penelitian ini, fokus bahasan mengenai objek pemberitaan sekaitan dengan kebijakan publik. Penelitian yang dilakukan oleh diana dan Eko kedua penelitian tersebut meneliti objek yang sama yakni sekaitan isu lingkungan. Penelitian yang dilakukan Eko meski hampir relevan, namun dalam penelitian tersebut hanya membahas kebijakan yang lebih spesifik yakni sekaitan pengelolaan lingkungan. Sementara dalam penelitian ini, tidak membahas kebijakan secara spesifik melainkan secara menyeluruh.

⁵Novia Panji, *Keberpihakan Media Massa(Studi Kualitatif Analisis Framing Konflik Nasdem antara Hary Tanoe dan Surya Paloh dalam Surat Kabar Seputar Indonesia(SINDO) DAN Media Indonesia Periode 22-31 Januari 2013)*, (Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Surakarta; Universitas Sebelas Maret, 2013).

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Media Massa

Media massa merupakan media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal pula. Media massa adalah institusi yang berperan sebagai *agent of change*, yaitu sebagai institusi pelopor perubahan. Ini adalah paradigma utama media massa. Liliweri juga menegaskan, sebenarnya salah satu ciri yang paling khas dalam komunikasi massa adalah sifat media massa.⁶ Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya.⁷ Komunikasi massa dapat diaplikasikan melalui media massa. Selain itu, komunikasi massa dapat didefinisikan berdasarkan bentuknya.

Menurut Cangara, media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat- alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, TV.⁸ Sementara menurut Efendi, media massa digunakan dalam komunikasi apabila komunikasi berjumlah banyak digunakan dalam kehidupan sehari- hari umumnya adalah surat kabar, radio, televisi, dan film bioskop, yang beroperasi dalam bidang

⁶Marhaeni Fajar, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*, (Cet. 1; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 223.

⁷Marhaeni Fajar, h. 225.

⁸Sora N, *Pengertian Media Massa dan Menurut Para Ahli*, diakses pada 10 September 2017 dari <http://www.pengertianku.net/2014/07/pengertian-media-massa-dan-menurut-para-ahli.html>.

informasi, edukasi, dan rekreasi, atau dalam istilah lain penerangan, pendidikan, dan hiburan.⁹

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai definisi media massa tersebut, dapat disimpulkan bahwa media massa adalah media (alat) yang digunakan untuk menyampaikan dan menyebarkan informasi kepada khalayak baik berupa cetak maupun elektronik. Salah satu media massa yakni media cetak atau *pers*. Istilah *pers* ini menjadi telah dikenal oleh masyarakat sebagai media komunikasi atau media massa. Selain itu, istilah tersebut juga lazim disebut sebagai surat kabar atau koran.

Pers menurut perumusan hasil undang-undang (Bab 1, pasal 1, ayat 1, UU No. 40/1999 tentang pers) yaitu, “pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”¹⁰ Mengacu pada beberapa penjelasan mengenai pers di atas, dapat disimpulkan bahwa pers adalah media cetak yang mengandung penyiaran, fakta, gagasan yang dituangkan dengan kata-kata tertulis¹¹ yang diterbitkan oleh suatu lembaga/perusahaan. Setiap lembaga

⁹Nuramalina Prihatiny, *Pengertian Media Massa*, diunduh pada 10 September 2017 dari http://www.kompasiana.com/nur.amalina22/pengertian-media-massa_550069dfa33315c73510b26.

¹⁰Alex Sobur, *Etika Pers: Profesionalisme Dengan Hati Nurani*, (Cet. 1; Bandung: Humaniora Utama Pers, 2001), h. 146.

¹¹Alex Sobour, *Etika Pers: Profesionalisme Dengan Htai Nurani*, h. 146.

pers memiliki visi dan misi tertentu. Hal ini berdasarkan dari *background* lembaga atau perusahaan tersebut. Dewasa ini, banyak lembaga pers yang memanfaatkan sebagai ajang bisnis dengan meraih keuntungan dari lembaga pers yang didirikan. Hal tersebut, sejalan dengan adanya undang- undang pers yang terbaru mengenai fungsi pers yakni No. 40/1999 pasal 3:

1. Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial;
2. Di samping fungsi- fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.¹²

Melihat dari undang- undang pers yang baru di mana fungsi pers salah satunya sebagai lembaga ekonomi yang bisa menjamin keberlangsungan hidup perusahaan. Hal ini tidak bisa dinafikan. Mengingat lembaga pers adalah lembaga atau perusahaan yang harus menghidupi karyawan dan para jurnalisnya. Selain itu biaya cetak dan segala kebutuhan operasional hingga berita dapat terbit dan dinikmati oleh pembaca. Namun demikian, lembaga pers seyogyanya melaksanakan fungsi pers sebagai lembaga ekonomi lebih bijak, dengan memperhatikan dan melaksanakan fungsi pers yang lain yakni sebagai kontrol sosial, bukan semata- mata meraih keuntungan.

Dalam penelitian ini, fokus penelitian pada media cetak lokal yakni Harian Palopo Pos dan Koran Seru!YA. Media yang digunakan untuk menyebarkan informasi baik mengenai kondisi masyarakat maupun pemerintahan di kota Palopo. Salah satu menjadi objek penelitian dalam pemberitaan media tersebut yakni mengenai kebijakan publik.

2. Pengertian Independensi dan Netralitas

¹²Jusnida Yusuf, *Skripsi: Peran Palopo Pos Dalam Menyebarkan Informasi Tentang Program Pembangunan Pemerintah Kota Palopo*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2015), h. 19.

Independensi adalah suatu keadaan atau posisi dimana suatu media atau lembaga tidak terikat dengan pihak manapun. Artinya keberadaan media atau suatu lembaga adalah mandiri, tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu. Independen dalam arti merdeka melaksanakan ideologi jurnalisme, sedangkan netral artinya berimbang, akurat, tak memihak kecuali demi kepentingan publik.¹³ Dalam konteks lain, independensi juga merupakan hak setiap manusia, yang memiliki hak bebas dan merdeka tanpa ditekan oleh orang lain. Tentu saja dalam pelaksanaannya yang disebut independen juga ada batasannya. Karena suatu lembaga atau organisasi juga tidak dapat eksis tanpa adanya dukungan dari pihak lain.

3. Prinsip Independensi dan Netralitas dalam Jurnalisme dan Journalistik

Jurnalisme adalah paham tentang kegiatan jurnalistik yang meliputi: mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan media. Dalam jurnalisme, terkandung idealisme. Ada suatu ideologi, yaitu usaha memberikan informasi untuk pemberdayaan masyarakat.¹⁴

Menurut Bill Kovach dan Tom Rosentiel, seorang jurnalis seidealnya memiliki sembilan elemen jurnalisme yaitu:

a. Kebenaran

Kebenaran yang dimaksud disini tentunya kebenaran yang tidak bersifat filosofis melainkan kebenaran bersifat fungsional. Kebenaran bersifat fungsional yakni kebenaran berdasarkan fungsi atau rentetan dari sebuah peristiwa. Kebenaran fungsional didapatkan melalui prosedur dan proses dalam menyingkap sebuah informasi atau berita berdasarkan fakta serta jangka waktu yang panjang untuk menghasilkan kebenaran yang lebih lengkap.

¹³Amir Efendi Siregar dkk., *Jurnal Dewan Pers: Mengungkap Independensi Media*, (Edisi no. 09. Cet. 1; Jakarta: Dewan Pers, 2014), h. 5.

¹⁴Amir Efendi dkk., *Jurnal Dewan Pers*, h.17.

b. Loyalitas

Loyalitas seorang wartawan pada dasarnya diabdikan untuk kepentingan masyarakat, bukan perusahaan, pembaca. Meski loyalitas terhadap perusahaan dan pembaca diperlukan.

c. Disiplin dalam melakukan verifikasi

Disiplin dalam melakukan verifikasi merupakan elemen yang sangat penting dalam menyaring desas-desus, gosip, ingatan keliru, manipulasi, guna mendapatkan data yang akurat. Disiplin dalam jurnanisme sering terkait dengan apa yang disebut sebagai objektifitas. Dalam penulisan berita, digunakan piramida terbalik di mana fakta yang penting diletakkan pada awal laporan, demikian seterusnya, hingga yang paling kurang penting. Sehingga hal inilah yang membedakan jurnanisme dengan hiburan, propaganda, fiksi atau seni.

d. Pengecekan fakta (independensi)

Independen terhadap orang-orang yang merekaliput. Tetap melakukan verifikasi, mengabdikan pada kepentingan masyarakat, dan memenuhi berbagai ketentuan ketentuan lain.

e. Memantau kekuasaan dan menyambung lidah mereka yang tertindas

Salah satu melakukan hal ini adalah melalui *investigative reporting*, sebuah jenis reportase dimana si wartawan berhasil menunjukkan siapa yang salah, siapa yang melakukan pelanggaran hukum, yang seharusnya jadi terdakwa, dalam suatu kejahatan publik yang sebelumnya dirahasiakan.

f. Jurnanisme sebagai forum publik

Melalui jurnanisme kebenaran dapat ditegakkan. Tentunya orang dapat datang menyampaikan tanggapan, kritikan dan sebagainya.

g. Harus memikat sekaligus relevan

Ironisnya dua hal ini sering dianggap dua hal yang bertolak- belakang. Namun demikian, cukup banyak bukti, bahwa masyarakat membutuhkan keduanya.

h. Kewajiban wartawan menjadikan beritanya proporsional dan komprehensif

Meski banyak surat kabar yang menyajikan judul berita yang sensasional. Karena memiliki prinsip untuk menarik minat pembaca.

i. Punya pertimbangan pribadi tentang etika dan tanggung jawab sosial.¹⁵

Kovach dan Rosenstiel berpendapat, wartawan boleh mengemukakan

pendapatnya dalam kolom opini (tidak dalam berita). Mereka tetap dibilang wartawan meski menunjukkan sikapnya dengan jelas. Menjadi netral bukanlah prinsip dasar jurnanisme. Imparsialitas juga bukan yang dimaksud dengan

¹⁵Andreas Harsono, 'Agama' Saya Adalah Jurnanisme, (Cet. V; Yogyakarta : Kanisius, 2014), h. 26- 30.

objektifitas. Prinsipnya, wartawan harus bersikap independen terhadap orang-orang yang mereka liput sehingga, semangat dan pikiran untuk bersikap independen ini lebih penting ketimbang netralitas. Independensi ini juga harus dijunjung tinggi di atas identitas lain seorang wartawan. Latar belakang etnik, agama, ideologi, atau kelas ini seyogyanya dijadikan bahan informasi untuk liputan mereka. Tapi, bukan dijadikan sebagai alasan untuk mendikte si wartawan.

Atmakusumah Atmaadja mengatakan bahwa etika pers dan standar jurnalisme profesional, yang keduanya bersifat universal bagaikan saudara kembar yang berasal dari satu telur. Keduanya menekankan bahwa media pers dan wartawan haruslah, umpamanya,

- a. Memperhatikan persyaratan penyajian karya jurnalistik, seperti objektivitas, keadilan, keberimbangan, dan ketidakbiasan;
- b. Cermat dalam hal akurasi bagi penyampaian fakta-fakta laporannya;
- c. Menghargai kehidupan pribadi (*privacy*) sepanjang tingkah laku dan perbuatan seseorang tidak mengganggu atau merugikan kepentingan umum;
- d. Tidak berprasangka atau bersikap diskriminatif terhadap perbedaan SARA, jenis kelamin dan bahasa;
- e. Tidak melecehkan dan merendahkan martabat orang-orang yang kurang beruntung, seperti kaum miskin, warga yang cacat jiwa atau sakit jiwa, dan warga yang sakit jasmani atau cacat jasmani;
- f. Menghormati hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan pers serta kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan memperoleh informasi;
- g. Tidak terbujuk oleh iming-iming narasumber yang hendak memberi “uang suap” atau “uang amplop” sehingga sajiannya tidak objektif dan tidak profesional;
- h. Bahkan, perlu sekuat tenaga menolak tekanan dari pihak luar berupa paksaan atau teror.¹⁶

Pengabaian terhadap beberapa kode etik jurnalistik dapat terjadi dalam batas-batas demi kemaslahatan atau kepentingan umum. Umpamanya, ketika

¹⁶Alex Sobur, *Etika Pers: Profesionalisme Dengan Nurani*, (Cet. 1; Bandung: Humaniora Utama Pers, 2001), h. xviii.

wartawan sedang melakukan peliputan dan penyelidikan mengenai penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat.

4. Indikator Independensi dan Netralitas

Objektivitas dan netralitas telah menjadi standar baku bagi jurnalistik yang menuntun kinerja mereka, sekaligus sebagai suatu ‘penanda’ bagi tingkat profesionalitas kinerja media.¹⁷ Di sini, liputan-liputan media yang objektif dan netral menjadi penanda bahwa media yang bersangkutan profesional, dan mempunyai tingkat independensi yang tinggi. Ini karena hanya media yang independen-lah yang mampu membuat reportase peristiwa secara objektif. Sebaliknya, media-media yang tidak independen akan cenderung membuat laporan-laporan yang bias dan tidak objektif.

Objektivitas didefinisikan sebagai aktivitas melaporkan kenyataan atau fakta, semampu yang bisa dilakukan oleh wartawan tanpa terpengaruh oleh prasangka dan opini personal.¹⁸ Objektivitas sangat erat dengan pemahaman secara kultural wartawan atas masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, wartawan mesti independen dari faksi. Wartawan, bagaimana pun juga, harus independen dari pihak yang mereka liput. Dengan demikian, wartawan bisa lebih

¹⁷Amir Efendi Siregar dkk., *Jurnal Dewan Pers: Mengungkap Independensi Media*, h. 7.

¹⁸Amir Efendi Siregar dkk., *Jurnal Dewan Pers: Mengungkap Independensi Media*, h. 7.

objektif.¹⁹ Independensi dari kelas atau status ekonomi, dan juga independen dari ras, etnis, agama, dan gender penting untuk menghasilkan berita yang obyektif.²⁰

Objektivitas sendiri dapat diamati dari tiga aspek yang berbeda, yaitu nilai, proses dan bahasa. Berkaitan dengan nilai, dapat dikorelasikan antara objektivitas dalam jurnalisme dengan tiga tujuan utama. *Pertama*, memisahkan fakta dari opini. *Kedua*, memilah deskripsi yang bersifat emosional dari berita. *Ketiga*, berupaya untuk keadilan dan keseimbangan.²¹

Sementara itu, dimensi prosedur kemungkinan meliputi upaya menyediakan cara pandang yang kontras, keseimbangan, dan cara pandang alternatif dengan menggunakan bukti pendukung, memastikan pengutipan secara tepat, dan akhirnya mengorganisir berita ke dalam format yang dikenal oleh kebanyakan masyarakat.²² Prosedur untuk memastikan independensi dan netralitas antara lain komitmen yang kuat untuk selalu memverifikasi informasi melalui metode yang obyektif. Aspek ketiga yang juga penting untuk mewujudkan objektivitas adalah bahasa. Bahasa adalah sarana menyampaikan fakta di dalam berita. Objektivitas adalah sejenis “permainan bahasa”, yang merupakan strategi spesifik menampilkan kembali kejadian, fakta, dan detailnya.²³

¹⁹Andreas Harsono, *'Agama' Saya adalah Jurnalisme*, h. 122.

²⁰Amir Efendi Siregar dkk., *Jurnal Dewan Pers*, h. 7.

²¹Amir Efendi Siregar dkk., *Jurnal Dewan Pers*, h. 7.

²²Amir Efendi Siregar dkk., *Jurnal Dewan Pers*, h. 7.

²³Amir Efendi Siregar dkk., *Jurnal Dewan Pers*. h. 7-8.

Beberapa indikator penting dalam melihat persoalan independensi (objektivitas) dan netralitas, diantaranya: ada tidaknya opini, unsur personalisasi, sensasionalisme, *stereotype*, *juxtaposition* atau *linkage*, dan akurasi dalam pemberitaan.

Fakta berkorespondensi dengan kejadian atau informasi yang ada di lapangan, sedangkan opini berkorespondensi dengan pendapat dan interpretasi tentang suatu kejadian atau isu. Fakta sendiri tidak selalu merujuk pada suatu kebenaran karena fakta bisa juga palsu (misalnya, hasil suatu rekayasa). Idealnya, jurnalis dapat menyajikan sebanyak mungkin fakta dalam berita agar publik memahami kejadian atau isu secara (relatif) utuh. Ini karena orang menggunakan informasi (berita) untuk segala macam tujuan, dan tujuan yang paling penting adalah untuk belajar tentang dunia di sekitar mereka (tempat mereka di dalamnya).²⁴

Unsur personalisasi dalam pemberitaan diartikan sebagai pandangan yang melihat pemilik atau aktor politik sebagai aktor utama/penting atau tunggal yang paling berpengaruh dalam sebuah peristiwa. Personalisasi dapat dilacak dengan melihat ada-tidaknya klaim peran yang berlebih-lebihan baik bernada positif maupun negatif terkait dengan pemilik atau aktor politik. Unsur personalisasi merupakan salah satu unsur penting (selain sensasionalisme, *stereotype* dan *linkage*) dalam menilai netralitas pemberitaan (media). Netralitas memiliki arti penting yang senada dengan keseimbangan namun lebih menekankan pada bagaimana informasi dipresentasikan. Untuk berita yang memuat unsur

²⁴Amir Efendi Siregar dkk., *Jurnal Dewan Pers*, h. 8.

personalisasi, seringkali, tidak mudah untuk diamati. Personalisasi muncul ketika media melalui jurnalisnya secara tidak sengaja ataupun sengaja terlalu menonjolkan *person* dibandingkan peristiwanya.²⁵ Dalam pandangan McQuail dikutip oleh Jurnal Dewan Pers edisi 09, unsur personalisasi ini menyebabkan minimnya keberagaman, kebenaran dan kualitas informasi dan berimplikasi pada pembatasan pengetahuan masyarakat tentang peristiwa sebenarnya (kondisi objektif).

Sensasionalisme (emosionalisme dan dramatisasi) merupakan dimensi-dimensi yang mengukur netralitas berita. Dalam penelitian ini, personalisasi sengaja dipisahkan dengan sensasionalisme karena berdasarkan hasil pengamatan berita, beberapa berita mengandung unsur sensasionalisme meskipun berita tersebut tidak mengandung unsur personalisasi. Sementara itu, dimensi sensasionalisme dalam penelitian ini dibatasi hanya pada unsur emosionalisme dan dramatisasi karena kedua unsur ini dianggap utama dalam mengukur ada-tidaknya sensasionalisme. Unsur sensasionalisme dalam berita diartikan sebagai sifat suka menimbulkan sensasi.

Sensasionalisme tidak dapat dibenarkan dalam karya jurnalistik yang menekankan objektivitas penyajian. Sensasionalisme, antara lain dapat dilihat dari ada-tidaknya unsur emosionalisme dan dramatisasi. Emosionalisme dapat diartikan sebagai penonjolan aspek emosi seperti ekspresi suka, benci, sedih, gembira, marah, kecewa yang berlebihan dibandingkan aspek logis rasional dalam penyajian sebuah berita. Meskipun penggunaan emosionalisme dapat mengangakat

²⁵Amir Efendi Siregar dkk., *Jurnal Dewan Pers*, h. 8.

sebuah berita, aspek objektivitas dan juga netralitas dalam pemberitaan menuntut sebuah penyajian berita yang “dingin” dan terkendali. Dramatisasi diartikan sebagai bentuk penyajian atau penulisan berita yang bersifat hiperbolik dan melebih-lebihkan sebuah fakta dengan maksud menimbulkan efek dramatis bagi pembacanya. Efek dramatis sengaja digunakan oleh jurnalis untuk dapat membantu pembaca lebih “mengalami” secara langsung peristiwa yang disajikan. Meskipun demikian, objektivitas pemberitaan menuntut sebuah penyajian berita yang hati-hati dan mengambil jarak dengan fakta yang dilaporkan. Disamping itu, oleh karena dramatisasi (termasuk dimensi-dimensi netralitas lainnya) lebih berkaitan dengan aspek presentasi suatu berita, maka dramatisasi juga dilihat dari penempatan dan sudut pandang berita. Di sini, aspek seperti apakah penyajian berita-berita di suatu medium memiliki kecenderungan membesar-besarkan pemilik media (dan/atau kelompok afiliasinya) atas kontribusinya dalam suatu hal atau peristiwa, dan mendiskreditkan (menjelek-jelekkkan) lawan politiknya juga dilihat.²⁶

Stereotype berkorespondensi dengan sebuah pandangan (cara pandang) terhadap seseorang atau kelompok sosial dimana cara pandang tersebut kemudian melekat, menyebar, meluas dan menjadi kepercayaan orang lain sebagai sesuatu kebenaran. *Stereotype* dalam konteks pemberitaan berkaitan dengan ada-tidaknya pemberian atribut tertentu terhadap individu atau kelompok dalam penyajian berita. *Stereotype* dapat menjadikan individu atau kelompok tertentu dalam berita sering dipersepsi dan diperlakukan berdasarkan atribut mereka. Atribut tersebut

²⁶Amir Efendi Siregar dkk., *Jurnal Dewan Pers*, h. 8.

mungkin memiliki asosiasi yang negatif maupun positif, tetapi yang jelas tidak pernah bersifat netral atau berdasarkan pada kenyataan yang sebenarnya. Penggunaan *stereotype*, baik yang bermakna positif maupun negatif, dalam penyajian sebuah berita dapat mengundang tuduhan keberpihakan wartawan atau media terhadap seseorang atau kelompok yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks komunikasi politik, pemberian atribut tertentu terhadap individu, kelompok, atau institusi tertentu dalam penyajian berita utamanya dilakukan kepada lawan-lawan politik. *Stereotype*, merupakan salah satu dimensi yang juga mengukur derajat netralitas pemberitaan. Dalam pemberitaan, seharusnya, *stereotype* dapat dihindari karena mengurangi aspek objektivitas berita. Berita (media) memiliki peran penting tidak saja memberikan informasi, tapi juga menyebarkan *stereotype*. *Stereotype* tentang seseorang dan/atau kelompok yang terus menerus diangkat oleh media, bukan tidak mungkin akan berpengaruh pada sikap seseorang terhadap orang lain dan/atau kelompok sosial karena terjadi penyesuaian informasi yang terjadi dalam pola pikir kita agar apa yang kita pikirkan sesuai dengan (rujukan) informasi yang ada (yang dapat mereka akses). Efek *stereotype* ditandai dengan munculnya kepercayaan, harapan, atau suatu pemikiran yang dipegang oleh seseorang tentang bagaimana menggolongkan suatu masyarakat yang kemudian informasi tersebut memiliki pengaruh pada cara bersikap atau perilaku seseorang terhadap kelompok dan anggota kelompok yang lain.²⁷

27Amir Efendi Siregar dkk., *Jurnal Dewan Pers*, h. 9.

Unsur penting berikutnya adalah *juxtaposition* dan *linkages*. *Juxtaposition* diartikan sebagai menyandingkan dua hal yang berbeda. *Juxtaposition* digunakan oleh wartawan untuk menyandingkan dua hal yang berbeda seolah-olah berhubungan dengan maksud untuk menimbulkan efek kontras dan/atau asosiatif, yang pada akhirnya menambah kesan dramatis berita yang disajikan. Dalam berita politik dimana pemilik memiliki kepentingan (seperti mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden), wartawan melakukan *juxtaposition* dengan cara ‘meninggikan’ pemilik menyangkut kebajikannya, kekayaannya, kecerdasannya, dan sebagainya dengan cara menghubungkannya dengan suatu hal. Dengan demikian, *juxtaposition* dapat mengubah atau menggeser pemaknaan dua fakta yang sebenarnya berbeda (tidak berhubungan) menjadi sama (berhubungan) secara kontras. Sementara itu, *linkages* berkaitan dengan upaya wartawan untuk menyandingkan dua fakta yang berlainan dengan maksud untuk menimbulkan efek asosiatif. Media sering menghubungkan beberapa hal, baik itu aspek yang berbeda dari suatu peristiwa; cerita yang berbeda dari halaman atau media yang sama; aktor yang berbeda yang berhubungan dengan peristiwa yang sama, dan sebagainya. Ini bertujuan untuk membangun kesatuan atas keragaman atau bisa juga untuk membangun *mood* tertentu. Wartawan menggunakan *linkages* untuk menghubungkan dua fakta yang sebenarnya berbeda sehingga kedua faktor tersebut dianggap (diasosiasikan) memiliki hubungan sebab akibat. Dalam penelitian ini, antara *juxtaposition* dan *linkages* tidak dipisahkan karena keduanya menggunakan teknik yang sama dalam melahirkan kesan asosiatif-berhubungan.²⁸

28Amir Efendi Siregar dkk., *Jurnal Dewan Pers*, h. 10.

Akurasi di sini dikaitkan dengan narasumber berita. Narasumber seharusnya memiliki kaitan dengan tema berita, misalnya orang yang tahu/mengalami suatu peristiwa, seorang yang ahli atau *expert* dan bukan karena berafiliasi dengan partai politik atau pendukung Capres atau Cawapres dijadikan narasumber. Kriteria ini penting karena narasumber memegang peran penting dalam memberikan informasi. Keahlian atau pengalaman menyangkut isu atau kejadian membuat penjelasan dan kesaksian yang mereka berikan memiliki nilai akurasi yang tinggi. Dalam pemberitaan, mengukur akurasi juga terkait dengan ketepatan dalam menulis sumber, penggunaan bahasa, penyajian data, penjelasan atau keterangan dan sebagainya. Dalam penelitian ini, akurasi hanya dikaitkan dengan narasumber karena di dalam berita politik persoalan ini menjadi isu penting.²⁹

5. Pengertian Kebijakan Publik

Beberapa definisi mengenai kebijakan publik menurut para ahli sebagai berikut:

a. Anderson

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat Negara.

b. Easton

Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat.

c. Menurut Mac Rae dan Wilde

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang.³⁰

²⁹Amir Efendi Siregar dkk., *Jurnal Dewan Pers*, h. 10.

³⁰<http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MAPU5301-M1.pdf>. Pengertian kebijakan Publik. (18 April 2017).

Laswell dan Kaplan mendefinisikan kebijakan publik sebagai *projected program of goal, value, and practice* atau pencapaian tujuan, nilai- nilai dan praktek yang terarah.³¹

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Publik adalah kumpulan dari berbagai keputusan –keputusan yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang.

Berbicara mengenai kebijakan publik, tentu tidak terlepas dari hasil keputusan- keputusan yang diambil oleh pemerintah baik untuk kepentingan pemerintahan maupun masyarakat. Hasil keputusan tersebutlah yang dituangkan dalam langkah konkrit seperti, program kerja yang dicanangkan oleh pemerintah yang disampaikan pada masa kampanye.

Aturan dan peraturan tersebut secara sederhana dapat dipahami sebagai kebijakan publik, sehingga dapat dikatakan kebijakan publik ini sebagai suatu hukum. Hal ini tidak hanya sekedar hukum, tetapi harus dipahami. Ketika suatu isu menyangkut kepentingan bersama, maka formulasi isu tersebut harus menjadi kebijakan publik yang diatur oleh para pejabat yang berwenang.³²Salah satunya adalah sistem pemerintahan di kota Palopo yang dipimpin oleh pasangan H.M.Judas Amir dan Ahmad Syarifuddin atau biasa dikenal dengan sebutan JA-Ome. Hal inilah yang menjadi penelusuran penulis untuk mengetahui bagaimana Palopo Pos dan Seru!YA berupaya untuk netral dan independen dalam menyajikan berita.

C. Kerangka Pikir

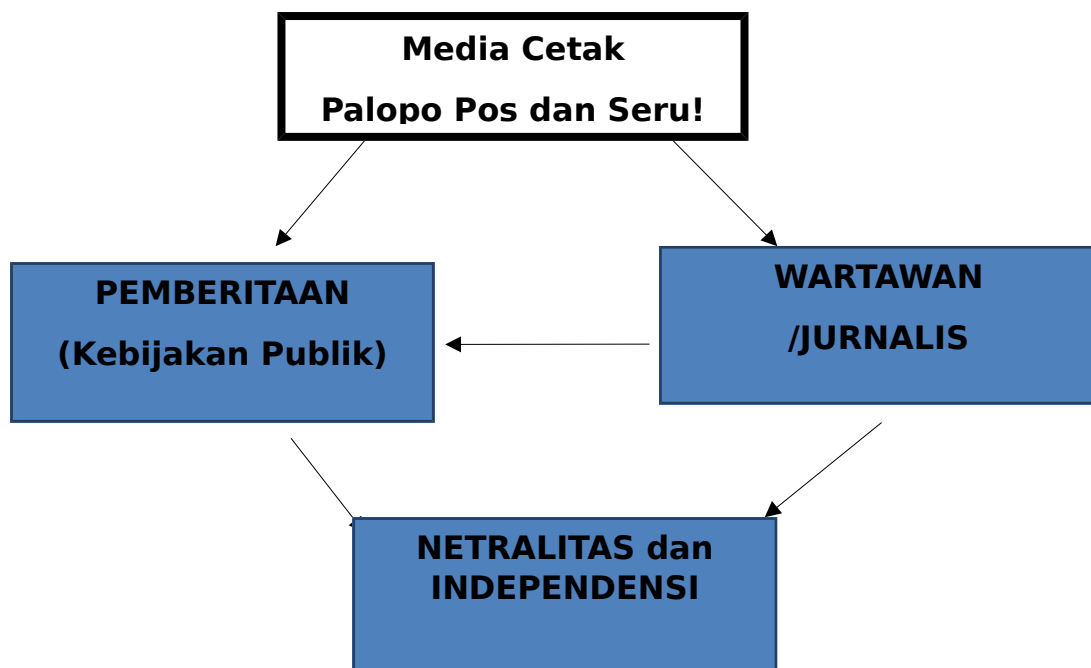
31Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik*, (Cet. 1; Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (pers), 2014), h. 3.

32Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik* (Cet. 1; Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (pers), 2014), h. 7.

Media massa merupakan media untuk menyebarkan informasi secara massiv kepada khalayak. Dalam hal ini adalah media cetak Palopo Pos dan Seru! YA. Salah satu peran dari media cetak yakni sebagai kontrol sosial atau dapat dikatakan sebagai penyambung aspirasi masyarakat terhadap kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, peran media sering kali jauh dari semestinya. Menjalankan perannya, tentu mengalami berbagai macam problema di satu sisi media harus memikirkan nasib para karyawan dan disisi lain media harus bersifat independen.

Seorang Jurnalis yang merupakan bagian penting dari media massa, tentu harus memposisikan diri sesuai dengan kode etik yang ada dalam melaporkan sebuah berita. Berbicara mengenai kebijakan publik, seorang jurnalis dan media massa dituntut untuk bersifat netral dan independen dalam memberitakan hal tersebut. Untuk bersifat netral dan independen, media massa haruslah jauh dari kepentingan pemiliknya agar berita yang disajikan bersifat objektif. Hal ini yang sering kali menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai media massa. Karena, di balik kepentingan- kepentingan rakyat, tentu media massa juga memiliki kepentingan sendiri.

Dalam penelitian ini, memfokuskan sejauh mana netralitas dan independensi media massa dalam hal ini media cetak Harian Palopo Pos dan Koran Seru!YA dalam memberitakan kebijakan publik baik berupa program-program maupun peraturan pemerintah kota Palopo.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *mix method*. *Mix method* atau metode kombinasi adalah metode penelitian yang menggabungkan antara metode kualitatif dengan metode kuantitatif. Menurut Johnson dan Cristensen yang dikutip oleh Elita Suratmi dalam artikelnya, metode kombinasi merupakan pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan atau menghubungkan antara metode penelitian kualitatif dengan metode penelitian kuantitatif. Hal ini mencakup landasan filosofis, penggunaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif serta mengkombinasikan keduanya.¹ Penggunaan *mix method* dalam penelitian ini agar data yang dihasilkan lebih komprehensif, valid, dan objektif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala pada saat penelitian. Dalam pendekatan deskriptif tidak terdapat perlakuan (*treatment*) yang diberikan atau dikendalikan. Tujuan pada penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran atau kondisi yang terdapat dalam suatu situasi.² Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan independensi dan netralitas media cetak secara detail.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

¹Elita Suratmi, *Metode Kombinasi*, diakses pada 18 Oktober 2017 dari <https://elitasurtami.wordpress.com/2013/02/11/metode-kombinasi/>.

²Eriyanto, *Analisis Naratif Dasar-Dasar dan Penerapannya dalam Analisis Teks Berita Media*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2013), h.

Penelitian berlokasi di kantor Palopo Pos dan Seru!YA kota Palopo. Peneliti memilih lokasi tersebut dengan alasan, bahwa Palopo Pos yang merupakan media senior atau lebih dulu ada di kota Palopo dan tentu telah memiliki peminat yang banyak dari kalangan masyarakat. Lain halnya dengan Seru!YA yang bisa dikatakan media cetak yang muda di kota Palopo turut mengambil peran dalam mengawal kebijakan –kebijakan pemerintahan. Selain itu, kedua media cetak tersebut merupakan objek dari penelitian ini. Peneliti akan menganalisis bagaimana kedua media cetak tersebut dalam menyajikan informasi mengenai kebijakan publik kepada masyarakat dan apakah kedua media cetak tersebut termasuk media yang netral dan independen.

Penelitian dilakukan mulai tanggal 14 September 2017 sampai 15 Januari 2018. Penelitian lapangan berjalan selama satu bulan, sementara penelitian yang dilakukan terhadap surat kabar melalui peng- *coding*-an oleh dua *coder* selama dua bulan, di mulai dari bulan Desember hingga bulan Januari. Untuk kelengkapan data penelitian, peneliti melakukan penelitian pada tanggal 20 bulan Februari 2018.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua) yakni;

1. Primer, yakni Harian Palopo Pos dan Koran Seru!YA
2. Sekunder terdiri dari;
 - a. **Informan**, yang terdiri atas pimpinan redaksi, wartawan dan mahasiswa.

Penelitian ini berusaha mencermati para informan secara teliti dengan cara

berupaya menemukan informasi dari informan yang paling mengetahui topik yang diteliti;

- b. **Dokumen**, berupa arsip pemberitaan, rumusan visi dan misi dan kegiatan yang dilakukan atau direncanakan;
- c. **Fenomena**, di lapangan yakni aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh media massa.³

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah unsur pimpinan dan karyawan dari media cetak Palopo Pos dan Seru!YA (masing- masing pimpinan redaksi dan dua orang wartawan), wartawan dari media cetak lain dan akademis, serta pelanggan dari kedua media cetak yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan menelusuri sejumlah literatur yang membahas tentang independensi dan netralitas media massa

2. Analisis Isi Berita

Analisis isi (*content analysis*) menurut Flomoy adalah suatu metode untuk mengamati dan mengukur isi komunikasi. Metode ini sering digunakan untuk mengetahui karakteristik isi surat kabar mengenai frekuensi, volume berdasarkan bidang masalah, penggunaan sumber informasi dan kecenderungan isi.⁴ Analisis isi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi kuantitatif. Analisis isi

³Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 172.

kuantitatif dapat didefinisikan sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi.⁵

Tujuan analisis isi dilakukan sebagai salah satu teknik pengumpulan data untuk mengetahui objektifitas surat kabar melalui menganalisis isi dari surat kabar yang menjadi objek penelitian. Analisis isi memiliki desain untuk menggambarkan karakteristik pesan yakni:

1. Analisis yang dipakai dari sumber yang sama tetapi dalam waktu yang berbeda. Analisa ini dipakai untuk menggambarkan kecenderungan (*tren*) atau sesuai dengan perkembangan dari suatu pesan komunikasi;
2. Analisis isi dipakai untuk melihat pesan pada situasi yang berbeda. situasi di sini dapat berupa konteks yang berbeda, budaya, sosial, dan politik;⁶
3. Analisis isi dipakai untuk melihat pesan pada khalyak yang berbeda. khalyak di sini merujuk pada pembaca, pendengar atau pemirsa media yang mempunyai karakteristik berbeda;
4. Analisis isi dipakai untuk melihat pesan dari komunikator yang berbeda. pada umumnya, penelitian ini ingin melihat kasus yang sama dan bagaimana

⁴Eko Kurniawan, *Tesis: Studi Analisis Pemberitaan Media Massa Tentang Lingkungan Hidup Dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pengelola Lingkungan Di Kabupaten Bangka*, (Program Magister Pascasarjana universitas Diponegoro Semarang, 2006), h. 38.

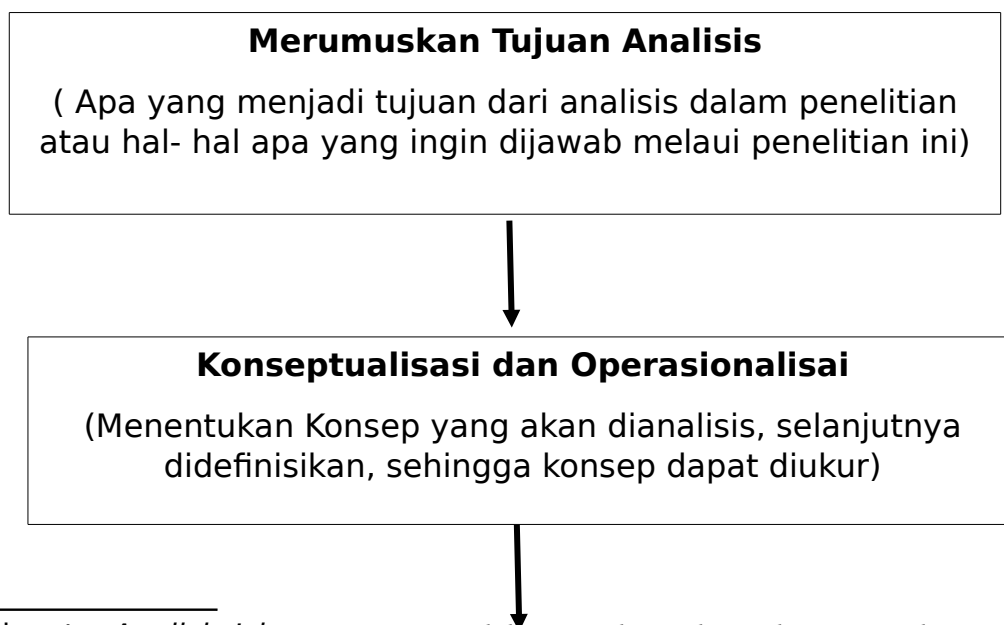
⁵Eriyanto, *Analisi isi*, (Ed. 1, Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group Pers, 2011), h. 15.

⁶Eriyanto, *Analisis Isi*, h. 34- 35.

komunikator yang berbeda menghasilkan isi (*content*) yang berbeda dari kasus yang berbeda.⁷

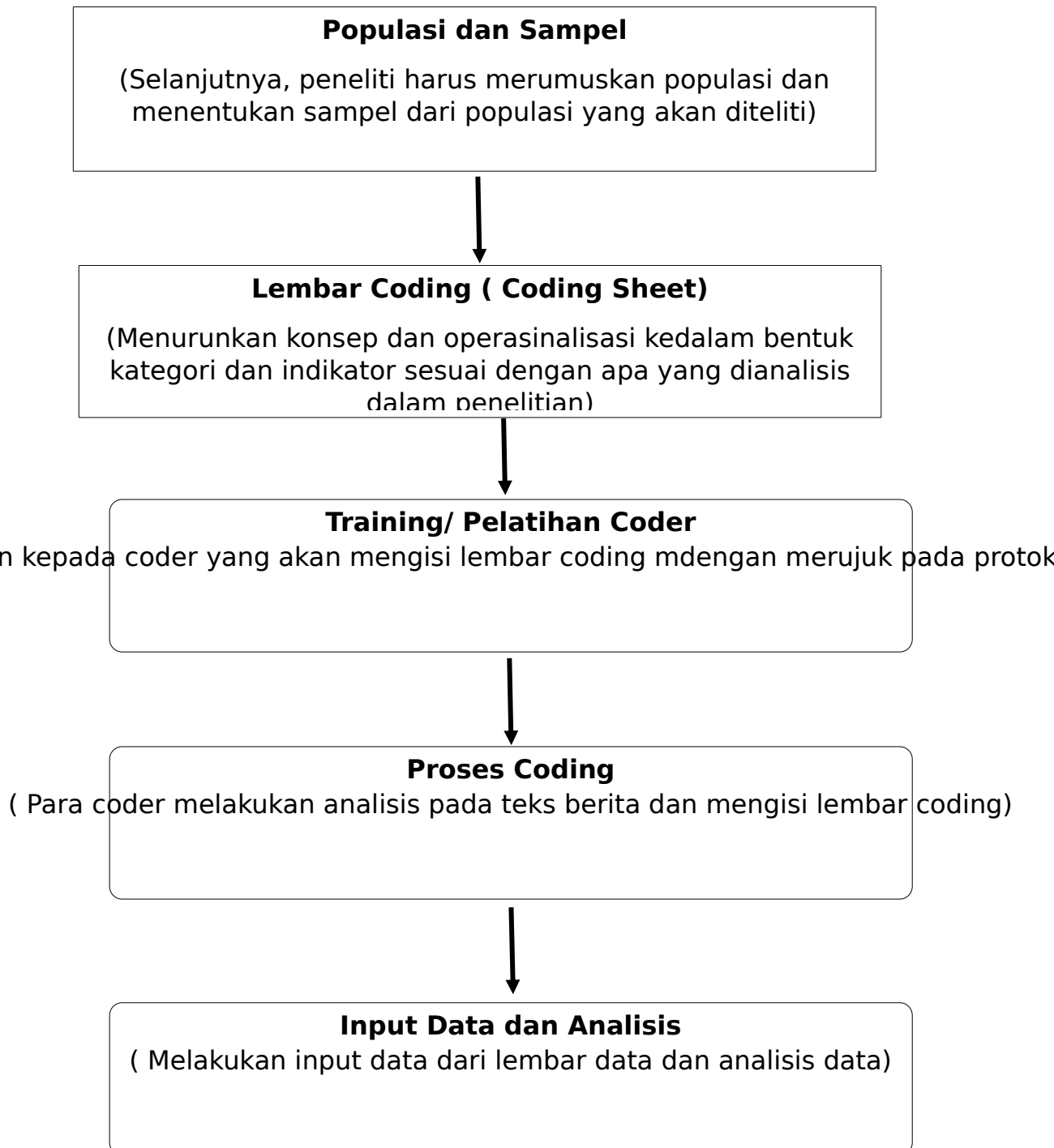
Metode ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran sekaligus melakukan penilaian tentang netralitas dalam pemberitaan. Analisis isi (*content Analysis*) dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Analisis isi deskriptif adalah analisis isi yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail suatu pesan, atau suatu teks tertentu. Desain analisis ini tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis tertentu, atau menguji hubungan di antara variabel.⁸ Inti dari pendekatan ini adalah menggambarkan segala aspek dari suatu teks berita secara detail.

Sebagai metode yang sistematis, analisis ini mengikuti suatu proses tertentu. secara sederhana dapat dilihat dari gambar berikut:



⁷Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi Dan Ilmu- Ilmu Sosial Lainnya*, (Ed. I. Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 38- 39.

⁸Eriyanto, *Analisis Isi*, h. 47.



Gambar 3.1 Tahapan Analisis isi

a) Penggunaan Unit Analisis

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) unit analisis yakni, unit analisis sample dan unit analisisis Tematik berikut penjelasannya.

- 1) Unit analisis sample adalah unit analisis dimana penelitian terfokus pada objek yang diteliti sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selain itu, di sini ditegaskan mana yang akan diteliti dan mana yang tidak termasuk objek penelitian. Misalnya, dalam penelitian ini, objek penelitian hanya terfokus pada berita mengenai kebijakan publik. Berita yang tidak termasuk kebijakan publik, tidak dikatakan sebagai objek penelitian.
- 2) Unit analisis Tematik. Dalam suatu berita yakni surat kabar terdiri dari beberapa unsur seperti gambar, kata, kalimat, paragraf. Peneliti harus menentukan unsur mana yang akan dicatat dalam penelitian dengan menggunakan beberapa jenis analisis pencatatan sesuai dengan tujuan penelitian. Salah satu unit analisis pencatatan adalah unit analisis tematik. Penelitian ini menggunakan unit analisis pencatatan Tematik dimana yang diteliti adalah teks berita yang berbicara mengenai kebijakan apa atau tentang apa. Misalnya, dalam penelitian sebuah surat kabar, yang akan diteliti adalah sebuah foto. Peneliti ingin mengetahui apa yang dibahas dalam gambar tersebut apakah foto tentang keadaan orang miskin, atukah berbicara mengenai presiden

yang tengah memberikan deklarasi. dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apa yang dibahas dalam suatu teks berita mengenai kebijakan publik, apakah mengenai kebijakan publik dalam bidang kesehatan pendidikan dan yang lain- lain.

Peneliti menggunakan kedua unit analisis tersebut dengan alasan untuk menggambarkan objektivitas suatu berita, tidak cukup hanya menggunakan unit analisis sampling. Oleh karena itu, peneliti menambahkan unit analisis tematik, agar data yang diperoleh lebih detail dan objektif.

b) Penarikan Sampel Analisis isi

Proses sampling yang digunakan adalah sampel sembarang. Sampel sembarang adalah penarikan sampel penelitian yang diambil secara sembarang, tidak membutuhkan teknik tertentu seperti penarikan sample acak dan penarikan sampel purposive. Dalam penarikan sampel ini, peneliti hanya mengambil sampel dari populasi yang ada. Penelitian ini menggunakan penarikan sampel sembarang dengan alasan dokumen/ arsip yang akan diteliti tidak lengkap atau sebagian hilang. Penarikan sampel dalam penelitian ini tidak bisa dikatakan sebagai penarikan sampel purposive tetapi, hampir mirip dengan penarikan sampel purposive. Perbedaannya, penarikan sampel purposive, peneliti mengambil sample dari dokumen atau arsip lengkap dengan menentukan jangka waktu objek penelitian, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel dari dokumen atau arsip tidak lengkap atau sebagian hilang dengan tetap menentukan jangka waktunya.

c) Konseptualisasi dan Operasionalisasi Analisis Isi

Dalam penelitian, ada objek yang akan diteliti. Untuk meneliti objek menggunakan analisis isi, peneliti harus mengetahui bagaimana objek tersebut dapat diteliti. Apakah melalui pengukuran atau menggunakan alat dan sebagainya. Apabila suatu objek yang diteliti melalui pengukuran maka, peneliti harus mengukur dan memiliki alat untuk mengukurnya. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian, peneliti harus menentukan apa yang mau diteliti dari objek tersebut. Jika menggunakan ukuran, apa yang mau diukur dan alat ukur apa yang akan digunakan, hal ini dinamakan konsep. Peneliti harus menentukan konsep. Konsep dapat didefinisikan sebagai representatif dari suatu objek atau gejala sosial. Arti lain dari konsep adalah gambaran singkat mengenai suatu fenomena atau realitas untuk mewakili suatu realitas yang kompleks. Melalui konsep, peneliti dapat menggambarkan atau mengabstrasikan suatu gejala yang akan diteliti. Setelah itu, konsep diberi definisi berdasarkan hasil dari referensi, baik itu buku atau hasil penelitian yang peneliti dapatkan. Definisi haruslah jelas dan jauh dari pengertian sehari-hari serta lebih ilmiah.

Pemberian definisi terhadap konsep inilah disebut sebagai konseptualisasi. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan konsep “ Objektivitas berita”. Oleh karena itu, peneliti harus mendefinisikan “ objektivitas berita”. Selanjutnya menurunkan dari konsep ke konkrit. Proses ini disebut operasionalisasi. Konsep yang telah ditentukan dioperasionalkan dalam bentuk indikator- indikator sehingga, konsep dapat diteliti secara empiris, karena hanya hal- hal konkrit yang bisa diteliti.

d) Lembar Coding (*Coding Sheet*)

Lembar coding adalah lembaran yang berisi kategori- kategori yang diturunkan dari proses operasionalisasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Lembar coding inilah yang akan diisi oleh *coder* yang telah dipilih setelah menilai teks berita berdasarkan kategori –kategori yang telah ditentukan dengan mengacu pada protokol yang telah disediakan oleh peneliti.

3. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap akademisi dan juga praktisi media. Wawancara dilakukan dengan memilih secara langsung narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Narasumber dari Palopo Pos dan Seru!YA masing –masing pimpinan redaksi dan 2 wartawan, 1 akademisi, 1 wartawan dari media cetak lain, serta 2 dari masing- masing pelanggan media cetak tersebut.

4. Observasi

Observasi dilakukan dua tahap. Pertama, observasi awal yang dilakukan untuk mengetahui gambaran awal dari objek penelitian. Kedua, observasi yang dilakukan untuk melihat ada tidaknya trend keberagaman isi berita juga dimaksudkan untuk mengamati porsi pemberitaan. Observasi ini dilakukan sebelum dan saat penelitian.

F. Teknik Pengolahan

Ada beberapa langkah dalam pengolahan data yakni:

- a. Penyusunan Data yaitu data yang telah diperoleh dari lapangan dikumpulkan kemudian disusun untuk memastikan kelengkapan data;

- b. Klasifikasi data yakni mengelompokkan data sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan peneliti. Pengelompokkan ini misalnya, dapat dimulai dengan memberikan kode kepada data untuk memudahkan peneliti dalam pengelompokkan;
- c. Pengolahan data dilakukan melalui analisis data.

G. Analisis Data

Analisis data yang dapat dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui analisis model Miles dan Hiberman dengan tahapan:

- a. Reduksi data yaitu merangkum informasi dan memilih hal-hal yang pokok, mencari pola dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data didasarkan pada tujuan yang akan dicapai;
- b. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori;
- c. Verifikasi data atau pengambilan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data.

H. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data, maka digunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah usaha mengecek keabsahan data melalui berbagai metode dan sudut pandang yang ada untuk menjawab pertanyaan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian, maka ditemukan jumlah berita yang diteliti sekitar 730 berita diantaranya 576 berita berasal dari surat kabar Palopo pos dan 154 berita berasal dari koran Seru!YA. Jumlah berita yang diteliti cukup banyak karena diambil dari semua halaman dan tidak ditentukan secara khusus. Selain itu, jumlah item per halaman sekitar 3- 6 item. Surat kabar palopo Pos dari 576 berita yang diteliti terdapat 14 berita kebijakan publik. Dari jumlah tersebut, 7 berita yang termasuk kategori kebijakan publik bidang ekonomi, 4 berita yang termasuk kategori kebijakan publik bidang sosial, dan 1 berita kategori kebijakan publik bidang politik serta 2 berita yang termasuk mengandung dua kategori yakni bidang ekonomi dan bidang sosial. Jumlah berita yang diteliti dari Seru!YA lebih sedikit dari Palopo Pos di karenakan data yang diambil dari koran Seru!YA tidak lengkap. dari 154 berita yang diteliti terdapat 5 berita kebijakan publik yang termasuk dalam kategori berita kebijakan publik bidang sosial. Jadi, total keseluruhan berita kebijakan publik yang diteliti sebanyak 19 berita.

Pada BAB II, peneliti telah menjelaskan bahwa ada beberapa unsur dalam melihat persoalan independensi dan netralitas pada sebuah berita yakni; ada tidaknya opini, unsur personalisasi, sensasionalisme, *stereotype*, *juxtaposition* atau *linkage*, dan akurasi dalam pemberitaan. Berdasarkan hasil analisis terhadap isi berita ke dua media cetak tersebut, dari 19 total berita kebijakan publik yang diteliti semua mengandung unsur akurasi.

Terdapat 5 diantaranya yang mengandung unsur lainnya, 4 berita dari media cetak Palopo Pos dan 1 berita dari media cetak Seru!YA, berikut penjabarannya;

1. Adanya Opini

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari 19 total berita kebijakan publik yang diteliti terdapat 2 berita yang mengandung opini, disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini. Dengan adanya opini yang terkandung dalam sebuah berita, akan mengurangi penyajian fakta, sehingga publik bisa saja tidak memperoleh kejadian berdasarkan realitas secara utuh.

Tabel 1.4
Berita yang mengandung Unsur Opini

NO.	MEDIA CETAK	HARI/TANGGAL	JUDUL BERITA
1.	Palopo Pos	Senin, 16 Januari 2017	Pemkot Gratiskan Raskin 6788 RTS
2.	Palopo Pos	Sabtu, 18 Februari 2017	Lurah Diingatkan Kelola Dana Sesuai Prioritas

2. Unsur personalisasi

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat unsur personalisasi sebanyak 3 dari 19 total berita. Berikut disajikan dalam bentuk tabel secara lengkap beserta judul berita. Adanya unsur personalisasi juga dapat mempengaruhi berita yang ditulis karena disajikan berdasarkan pandangan orang yang paling berpengaruh dalam peristiwa tersebut.

Tabel 2.4
Berita yang mengandung Unsur Personalisasi

NO.	MEDIA CETAK	HARI/ TANGGAL	JUDUL BERITA
1.	Palopo Pos	Senin, 16 Januari 2017	Tenaga Mengajar Mulai Direkrut
2.	Palopo Pos	Sabtu, 18 Februari	Bikin Orang Berkesan Dengan

		2017	Palopo
3.	Seru!YA	Jum;at, 06 Januari 2017	Palopo Jadi Smart City

3. Juxtuposition atau linkage

Juxtuposition atau *Linkage* digunakan oleh wartawan untuk menyangdingkan dua hal yang berbeda seolah-olah berhubungan dengan maksud untuk menimbulkan efek kontras dan/atau asosiatif, yang pada akhirnya menambah kesan dramatis berita yang disajikan. Dari 19 total berita yang diteliti 3 berita yang mengandung juxtuposition atau linkage berikut disajikan dalam bentuk tabel 5.4.

Tabel 3.4

Berita yang mengandung Unsur Justuposition atau Linkage

NO.	MEDIA CETAK	HARI/TANGGAL	JUDUL BERITA
1.	Palopo Pos	Kamis, 30 Maret 2017	Presiden Setuju Bahas Revisi UU ASN
2.	Seru!YA	Jum'at, 06 Januari 2017	Palopo Jadi Smart City
3.	Palopo Pos	Senin, 16 Januari 2017	Pemkot Gratiskan Raskin 6.788 RTS

4. Akurasi

Akurasi dari sebuah berita yang diperoleh dari narasumber juga mempengaruhi penyajian fakta dari sebuah isu/ peristiwa. Tingkat akurasi dari sebuah berita yang disajikan baik dari koran palopo Pos maupun seru!YA rata – rata memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Berikut tingkat akurasi dari 19 berita kebijakan publik yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 4.4

Tingkat Akurasi Berita

No.	Media Cetak	Waktu Terbit	Judul berita	Tingkat Akurasi
1.	Palopo Pos	Kamis,30 Maret 2017	Palopo Bertabur Program Serba Gratis	Rendah
2.	Palopo Pos	Kamis, 30 Maret 2017	45 Bhabinkamtibmas Sisir wara timur	Tinggi
3.	Palopo Pos	19 Januari 2017	Komite Sekolah Dilarang Lakukan Pungutan Ke Siswa	Sedang
4.	Palopo Pos	Kamis, 16 Februari 2017	Palopo Satu- Satunya di Indonesia Terapkan BPJS Gratis	Tinggi
5.	Palopo Pos	Senin, 27 Januari 2017	Kemenag Patok BPIH Palopo Rp 39 Juta lebih	Sedang
6.	Palopo Pos	Kamis, 30 Maret 2017	Besok, Deadline Laporan SPT Tahunan	Tinggi
7.	Palopo Pos	Senin, 27 Maret 2017	Pelayanan Tax Amnesty Buka Hingga Malam	Sedang
8.	Palopo Pos	Rabu, 11 Januari 2017	Pemkab Siapkan Rp 2,3 Miliar	Tinggi
9.	Palopo Pos	Rabu, 11 Januari 2017	Hanya Rp 228 Juta BPPKP Programkan Tiga Item	Sedang
10.	Palopo Pos	Kamis, 30 Maret 2017	Presiden Setuju Bahas Revisi UU ASN	Tinggi
11.	Palopo Pos	Senin, 16 Januari 2017	Tenaga Mengajar Mulai Direkrut	Tinggi
12.	Palopo Pos	Sabtu, 18 Februari 2017	Bikin Orang Berkesan Dengan Palopo	Sedang
13.	Palopo Pos	Sabtu, 18 Februari 2017	Lurah Diingatkan Kelola Dana Sesuai Prioritas	Tinggi
14.	Palopo Pos	16 Januari 2017	Pemkot Gratiskan Raskin 6788 RTS	Tinggi

15.	Seru!YA	Selasa, 24 Januari 2017	Bangun 2000 Jamban Bagi Warga Tak Mampu	Sangat Tinggi
16.	Seru!YA	Selasa, 24 Januari 2017	Subsidi Iuran BPJS Kesehatan Dianggarkan Rp 15 Miliar	Tinggi
17.	Seru!YA	Rabu, 04 januari 2017	Biaya Urus STNK Naik 3 Kali Lipat	Rendah
18.	Seru!YA	Kamis, 05 Januari 2017	Satpol PP Tertibkan PKL	Sangat Tinggi
19.	Seru!YA	Jumat, 06 Januari 2017	Palopo Jadi Smart City	Tinggi

1. Upaya yang dilakukan oleh Palopo Pos dan Seru!YA menjadi media yang netral dan independen

Palopo Pos adalah salah satu media cetak lokal di bawah kepemimpinan Amran Suyuti selaku Direktur Utama. Selain itu, media cetak tersebut cukup bergeming dalam mengawal kinerja dari pemerintahan. Untuk menjadi media yang netral dan Independen, tentu tidak semudah teori yang bias dikatakan oleh para ahli yang biasa menjadi rujukan kaum intelektual dalam hal pengaplikasiannya. Perbedaan interpretasi mengenai netralitas dan independensi dari media cetak merupakan hal yang wajar. Hal ini disebabkan berbagai faktor salah satunya ideologi yang dipahami oleh masing- masing pemilik perusahaan. Di Harian Palopo Pos independensi diartikan dalam konteks bebas menyuarakan kebenaran sesuai fakta yang ada. Selain itu, dalam pencarian berita, wartawan mesti mencari sumber- sumber terkait pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut dari berbagai sisi. Upaya yang dilakukan Palopo Pos agar tetap menjadi media

yang netral dan independen misalnya dengan pendisiplinan wartawan, pelatihan bagi wartawan serta evaluasi terhadap kinerja wartawan selama meliput di lapangan dan tetap mengacu pada kode etik jurnalistik serta UU Pers. Wartawan yang bertugas di lapangan, dituntut untuk mencari berita berdasarkan fakta dan menghindari *amplop*¹ dari nara sumber atau pihak yang terlibat dari peristiwa tersebut, sehingga berita yang disajikan apa adanya sesuai dengan fakta.

Adapun Koran Seru!YA didirikan hanya sebagai salah satu media/ sumber informasi bagi masyarakat Luwu Raya dipimpin oleh Chaerul Baderu. Secara harfiah, saat ini sangat sulit mendapatkan media yang independen, karena kebanyakan orientasi didirikan media tersebut yakni untuk berbisnis termasuk koran Seru!YA. Hal ini dikatakan oleh Adnan selaku Pimpinan Redaksi dari media cetak tersebut bahwa untuk saat ini sangat sulit menemukan media yang independen, apalagi koran lokal. Tujuan didirikannya Seru!YA memang untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, menyampaikan informasi dan sebagainya. Tapi, independen dalam hal tertentu.² Upaya yang dilakukan Seru!YA untuk tetap menjadi independen dengan menanamkan idealis kepada para wartawan. Idealis dalam hal misalnya tidak menerima *amplop*, menyajikan informasi kepada masyarakat berdasarkan fakta dan menaikkan gaji wartawan. Karena apabila wartawan sejahtera mereka juga akan independen.³

¹Amplop termasuk praktik korupsi dalam perspektif dunia jurnalistik.

²Adnan, Pimpinan Redaksi Seru!YA, *wawancara* pada tanggal 20 September 2017.

³Adnan, Pimpinan Redaksi.

2. Hambatan –hambatan Palopo Pos dan Seru!YA menjadi media yang netral dan independen

Hambatan –hambatan yang dihadapi kedua media cetak tersebut salah satunya menghindari adanya pemberian *amplop*. Berbagai macam pandangan wartawan sekaitan dengan penerimaan *amplop*, ada yang mengatakan apabila hal itu tidak mengganggu esensi dari berita maka diterima, dan ada pula yang mengatakan ditolak apabila maksud dari pemberian tersebut negative. Indra Rukhman salah satu wartawan Palopo Pos mengatakan bahwa;

”Biasanya ketika meliput suatu berita, biasanya ada disediakan oleh narasumber untuk menghargai atau berupa ongkos transportasi misalnya dalam kegiatan konferensi pers. Dan itu hak dari teman- teman wartawan yang lain. Tapi, tidak untuk mengganggu gugat esensi dari fakta berita. Dan hal tersebut tidak diperbolehn dalam perusahaan.”⁴

Palopo Pos tentunya akan mengambil tindakan tegas apabila diketahui dari salah satu karyawannya dalam hal ini wartawan apabila menerima “ amplop” yakni dilakukan pemecatan. Selain itu, Palopo Pos tetap berusaha untuk mengawal sebaik mungkin kinerja pemerintahan serta menyajikan fakta. Menurut salah satu wartawan sekaligus Redaktur Seru!YA karena faktor kurangnya SDM berpendapat dalam hal penerimaan *amplop* bahwa jurnalis semestinya tetap beracuan terhadap kode etik jurnalistik dan tergantung dari kondisi melihat wartawan sebagai makhluk sosial yang memiliki kebutuhan dan melibatkan persaan akibat sering melakukan penolakan. Dengan demikian, penerimaan *amplop* diperbolehkan.⁵ Selain itu, hambatan yang dialami selama peliputan berita

⁴Indar Rukhman, wartawan Palopo Pos, *wawancara* pada tanggal 26 September 2017.

yakni kurangnya pengalaman dan link terkait narasumber yang akan diwawancarai.

3. Efek yang ditimbulkan menjadi media yang netral dan independen terhadap keberlangsungan hidup perusahaan dan wartawan

Netralitas dan independensi sangat penting dikarenakan tujuan dari media tersebut sebagai kontrol sosial. Oleh karena itu, kedua hal tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup perusahaan. Perusahaan tetap menyajikan informasi sesuai dengan fakta yang ada dengan tetap melakukan mitra kerja dengan berbagai pihak secara bijak. Tidak bisa dipungkiri bahwa, media massa lokal tidak bisa selalu melakukan kritik yang keras, karena akan mempengaruhi keberlangsungan hidup karyawan dan perusahaan. Seru!YA tetap melakukan kontrol sosial dan memberitakan yang perlu diberitakan.

Dalam penerbitan sebuah berita, otonomi redaksi turut berperan sebelum berita tersebut dicetak dan diedarkan. Ariyanto sebagai Pimred Palopo Pos mengatakan bahwa tidak semua berita yang diliput dimuat. Hal ini berdasarkan hasil pertimbangan tertentu, misalnya terkait menjaga hubungan dengan mitra terhadap perusahaan dan efek yang ditimbulkan dari berita tersebut terhadap narasumber, meski hal itu jarang dilakukan.⁶ Selain itu, apabila suatu masalah tidak memiliki data yang valid, maka berita tersebut tidak diterbitkan. Menjaga

⁵Salah satu wartawan dan Redaktur Seru!YA, *wawancara* pada tanggal 20 September 2017.

⁶Ariyanto, Pimpinan Redaksi Harian Palopo Pos, *wawancara* pada tanggal 01 Oktober 2017.

mitra atau kerja sama perusahaan sangat penting karena para mitra memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap media cetak misalnya, pemasangan iklan dan kontrak.

Fungsi media cetak sebagai kontrol sosial baik bagi masyarakat maupun pemerintahan, tentu tak mudah dan sering kali mengalami pergeseran nilai pada wilayah pengaplikasiannya. Berbagai faktor mempengaruhi terutama ketika suatu media dikaitkan dengan independen dalam mengawal masyarakat dan sistem pemerintahan. Pada dasarnya, media cetak tidak bisa terlepas dari berbagai unsur luar, layaknya manusia, makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang yang ada disekitarnya, sehingga mereka harus berinteraksi. Demikian halnya dengan media cetak. Media cetak mesti menjalin kerja sama baik dengan masyarakat maupun dengan pemerintah. Selain itu, media cetak tetap harus bijak dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, demi menjalankan fungsi media tersebut dengan baik sehingga, tidak ada pihak yang dirugikan. Kedua media cetak tersebut memiliki pandangan yang berbeda sekaitan dengan netralitas dan independensi media serta pengaplikasiannya dalam perusahaan.

“Netralitas dan Independensi adalah dua hal yang berbeda. Secara umum, netral artinya bebas tidak berpihak (berimbang), sementara independen berarti “bebas, merdeka dan berdiri sendiri”. Terkait netralitas dan independensi media massa, sangat sulit terwujud. Apalagi terkait berita politik yang melibatkan pihak penguasa atau pejabat pemerintah. Pemberitaan politik akan sulit tidak berpihak ke penguasa. Karena, terkait masalah iklan. Media massa hanya bisa hidup dan berkembang dari besarnya nilai iklan yang masuk ke perusahaan.”⁷

⁷Sahar, wartawan Fadjar biro Luwu Timur, *wawancara* pada tanggal 02 Oktober 2017.

Kedua media cetak tersebut masih perlu melakukan perannya sebagai kontrol sosial dan benar-benar menjadi media yang selalu berupaya menjaga netralitas dan independensi media massa. Wartawan meski menulis berita dengan apa adanya dan tidak hanya melihat dari satu sisi melainkan melihat suatu peristiwa dari berbagai sudut pandang, sehingga berita yang ditulis berimbang.

“Seharusnya wartawan mencari tahu berita sebelum menulisnya, tidak sekedar menulis. Kemudian, hanya menonjolkan satu sisi saja misalnya, hanya diberitakan dari positifnya saja dan sisi lainnya tidak ditonjolkan...”⁸

Sekaitan dengan penerimaan *amplop*, hak tersebut termasuk dalam praktik-praktik korupsi dalam perspektif dunia jurnalistik. Itulah yang menjadi tantangan umumnya bagi media yang diteliti tidak terkecuali media lain terkhusus bagi wartawan dari media tersebut. Tidak hanya wartawan media lokal, pun media nasional. Tindakan tersebut tidak dapat dipungkiri, melihat pendapatan yang diperoleh oleh wartawan tidak sesuai dengan kebutuhan. Namun, hal ini tidak dapat dijadikan alasan wartawan untuk menerima *amplop*. Tetapi, lebih kepada bagaimana seorang wartawan bekerja secara profesional dan proposional.

Dikutip oleh Annet dari Sardi, Haryanto, dan *The Jakarta Post* bahwa, angket yang dilakukan terhadap para wartawan di Jakarta memperlihatkan bahwa desakan ekonomi, bukanlah motivasi penerimaan *amplop* tersebut. Sebaliknya, masalah profesionalisme menunjukkan persentase terbesar (46.5%) dari peserta

⁸Aulia, Mahasiswi semester VII jurusan Bahasa Inggris IAIN Palopo, wawancara pada tanggal 27 September 2017.

angket mengatakan seorang wartawan tetap dapat menulis berita dengan seimbang meski telah menerima imbalan uang.⁹

Berbicara tentang profesionalisme, kembali kepada individu yang menginterpretasikan apakah wartawan adalah sebuah “profesi” atau bukan. Hal ini tercantum pada undang-undang dan peraturan pers dan wartawan seperti, UU No. 40/1999 Bab1, pasal 1, ayat 10 yaitu: ” Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya...” dan Bab III, pasal 8 yaitu: “Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapatkan perlindungan hukum.”¹⁰

Agar media tetap terbit kepada pembaca, namun tetap menjadi media yang netral dan independen, tentu dibutuhkan trik khusus/ strategi yang perlu dirumuskan dengan serius. Selain itu, tetap menjaga hubungan dengan pemeritahan dan mitra lainnya , tanpa menafikkan peran media untuk mengontrol kebijakan pemerintahan.¹¹ Dengan demikian, media tidak hilang kepercayaan dari masyarakat/ publik.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Penerapan netralitas dan independensi selalu diupayakan oleh setiap media massa. Hal ini dikarenakan media massa dalam hal ini pers tidak boleh keluar dari koridor yang telah di atur oleh kode etik jurnalistik dan undang-undang pers. Salah satu fungsi dari pers atau media cetak yakni sebagai kontrol sosial.

⁹Annet Keller, *Tantangan Dari Dalam (Otonomi Redaksi di 4 Media Cetak Nasional: Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika)*,(ed. 1; Jakarta: 2009), h. 36.

¹⁰Alex Sobour, *Etika Pers (Profesionalisme Dengan Hati Nurani)*,(cet. 1; Bandung: Humaniora Utama Pers, 2001),h. 102.

¹¹Sahar, *wawancara* pada tanggal 02 Oktober 2017.

Alex Sobour mengutip dari buku Sukarna bahwa fungsi kontrol sosial pers mempunyai banyak tujuan, lima di antaranya;

1. Untuk menjaga undang- undang yang dibuat oleh rakyat agar dijalankan sebaik- baiknya oleh semua pihak;
2. Untuk melindungi hak- hak asasi manusia dari tindakan- tindakan yang dilakukan sewenang- wenang oleh siapa pun;
3. Untuk melindungi kepentingan- kepentingan baik kepentingan sosial, politik, ekonomi maupun budaya. Apabila kontrol sosial terlaksana dengan efektif maka, kepentingan- kepentingan masyarakat akan terjamin;
4. Kontrol sosial bertujuan untuk mewujudkan adanya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh baik material maupun spiritual.;
5. Untuk melakukan koreksi- koreksi terhadap posisi para pejabat. Apakah sesuai dengan pilihan rakyat dan sesuai berdasarkan kualitas yang dimiliki oleh para pejabat dengan penempatannya di pemerinyahan demi mewujudkan *clean goverment* (pemerintahan yang bersih);¹²

Berbicara tentang netralitas dan independensi media cetak baik lokal maupun nasional, semua beracuan kepada peraturan yang berlaku. Kedua hal tersebut sangat erat kaitannya dengan seorang jurnalis. Jika ingin netralitas dan independensi terwujud, maka salah satu yang perlu diperhatikan apabila seorang jurnalis memiliki kedua prinsip tersebut. Bagi jurnalis pun memiliki peraturan yang seyogyanya diupayakan dalam pengaplikasiannya yakni sembilan elemen jurnalisme. Meski sangat sulit, seorang jurnalis idealnya mampu dan senantiasa

¹²Alex Sobur, *Etika Pers (Profesionalisme Dengan Hati Nurani)*,(cet. 1; Bandung: Humaniora Utama Pers, 2001), h. 148,149,152.

berupaya sebaik mungkin untuk menerapkan sembilan elemen tersebut. Dengan demikian, seorang wartawan tidak tersesat, karena sembilan elemen jurnalis tersebut merupakan panduan, penerang jalan bagi seorang jurnalis .

Sebagaimana yang dikatakan Kovach salah satu wartawan Amerika yang reputasinya melintasi banyak negara sekaligus salah satu penulis dari buku yang berjudul *Sembilan Elemen Jurnalisme* yang diterjemahkan oleh Andreas Harsono bahwa, sembilan elemen jurnalisme ibarat bintang di langit. Para pelaut membutuhkan bintang- bintang di langit agar tidak tersesat. Demikian halnya dengan sembilan elemen jurnalisme semacam jadi pedoman, ke mana wartawan harus mengarahkan pekerjaannya.¹³

Berdasarkan hasil analisis teks berita dilihat dari netralitas dan independensi suatu berita, wartawan dalam melakukan pekerjaannya mulai dari peliputan sampai dengan penulisan, masih kurang profesional dan proposional. Hal ini disebabkan oleh wartawan yang belum fasih dalam membedakan antara opini dan berita. Wartawan sering kali membaurkan keduanya. Berita yang ditulis terlalu didramatisir dengan prinsip agar berita tersebut menarik minat pembaca tanpa memperhatikan keautentikan suatu fakta. Selain itu, kualitas seorang wartawan bisa mempengaruhi netralitas dan independensi suatu berita baik dari segi pengalaman maupun dari segi pendidikan. Wartawan seyogyanya tidak hanya memiliki pengalaman dalam hal teknik meliput dan menulis berita. Tetapi, harus dibekali dengan pengetahuan yang memadai. Pengetahuan dan pengalaman meski

¹³Andreas Harsono, *'Agama' Saya Adalah Jurnalisme*, (cet. V; Yogyakarta: Kanisius, 2014), h. 207.

sejalan. Meski setiap individu, memiliki perbedaan terhadap kedua hal tersebut, wartawan tetap harus memiliki keduanya.

Jurnalisme adalah perpaduan antara seni dan ilmu. Itulah sebabnya mengandalkan bakat saja tidaklah cukup untuk dijadikan sebagai seorang wartawan. Terlebih lagi untuk menjadi wartawan yang baik dan profesional. Orang yang mempunyai bakat dan teori akan mencapai prestasi yang lebih baik dari pada orang yang hanya mengalami praktik (pengalaman).¹⁴ Sementara itu, di negara- negara yang telah maju sekalipun, hingga kini masih memperdebatkan tentang perlu- tidaknya pendidikan bagi seorang wartawan sebelum ia terjun ke bidang kewartawanan. Terlepas dari perdebatan itu, dalam kenyataannya, hampir di seluruh negara termasuk Indonesia, dikenal adanya perguruan tinggi yang memiliki akademi/ program studi/jurusan komunikasi.¹⁵

Karena itu, untuk pengembangan pers, yang sanggup memenuhi kebutuhan masyarakat, yakni pers yang mampu menyajikan berita sebagai sumber informasi dan komunikasi secara lebih lengkap, aktual, dan jelas, tetap berlaku kualifikasi bagi wartawan yang tercantum dalam buku- buku jurnalistik. Dengan demikian, kualifikasi yakni, kepekaan terhadap masalah manusia, berpikir kritis, lincah, terus mencari kebenaran, hati yang hangat, penuh kompassi, gelisah, serta semangat kerja keras dan tidak setengah- setengah adalah persyaratan pokok yang harus dimiliki oleh seorang wartawan. Tanpa kualifikasi tersebut, wartawan tidak

¹⁴Andreas Harsono, *'Agama' Saya Adalah Jurnalisme*, h.131.

¹⁵Andreas Harsono, h. 133.

akan bisa berkembang secara optimal, dengan demikian, tidak akan mampu mendukung koran secara maksimal.¹⁶

Selain dari seorang jurnalis, netralitas dan independensi suatu media cetak dilihat dari pemilik dari media tersebut. Karena, media cetak mesti melakukan kerjasama dengan berbagai mitra baik itu pemerintahan maupun tokoh politik. Hal ini sekaitan dengan adanya undang –undang pers pasal 3, ayat 2 yakni, fungsi pers sebagai lembaga ekonomi yang seringkali disalahgunakan. Di mana pemilik media sering kali membaurkan kepentingannya ke dalam media.

Pemilik media yang memiliki bisnis dalam bidang lain dapat membawa kepentingan ekonomis tertentu atau juga aspirasi politis mereka kedalam ruang redaksi dengan memberikan tekanan yang tidak relevan dengan nilai- nilai jurnalistik.¹⁷

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kedua media cetak lokal yakni Harian Palopo Pos dan Koran Seru!YA, bahwa dalam upayanya menjadi media yang netral dan independen, terdapat hambatan yang dihadapi yakni kurangnya pengalaman terjun ke lapangan dalam meliput berita bagi wartawan yang baru mengawali kariernya, sehingga kesulitan dalam mendapatkan informasi disebabkan belum memiliki link yang bisa menjadi narasumber. Selain itu,

¹⁶Andreas Harsono, h. 139- 140.

¹⁷Annet Keller, *Tantangan Dari Dalam (Otonomi Redaksi di 4 Media Nasional: Koran Tempo, Kompas, Media Indonesia, Republika)*,(ed. 1; Jakarta: 2009), h. 7.

penerimaan *amplop*¹⁸ dikalangan wartawan tertentu yang masih sulit dihindari. Hal ini terjadi, melihat pendapatan para wartawan jauh diatas kebutuhan. Namun, terlepas dari hal tersebut, di sinilah dibutuhkan sikap profesionalisme seorang wartawan. Tanpa sikap profesionalisme dari seorang wartawan, maka pers atau media cetak tidak lagi dikatakan sebagai *watchdog* akan tetapi lebih kepada pelayan dari kaum yang berkuasa.

Dalam upayanya menjadi media yang netral dan independen, Harian Palopo Pos dan Koran Seru!YA, keduanya mengatakan hal tersebut mempengaruhi keberlangsungan hidup perusahaan dan para wartawan. Secara harfiah, tidak ada media baik itu lokal maupun nasional yang mampu independen. Hal tersebut dikarenakan media hanya bisa hidup dan berkembang melalui besarnya nilai iklan yang masuk. Selain itu, kontrak dengan instansi tertentu juga menambah pemasukan perusahaan untuk menggaji wartawan dan karyawannya. Selama tidak melanggar kode etik yang telah berlaku dan tidak merugikan masyarakat dalam hal memenuhi haknya mendapatkan informasi yang faktual, media tetap dapat bekerjasama dengan instansi pemerintahan dan swasta, serta tetap berupaya untuk tidak menjadikan media semata-mata sebagai ajang untuk berbisnis. Apabila media cetak tidak bersifat netral dan independen, maka media cetak atau pers tidak akan mendapat kepercayaan dari publik. Jika demikian, maka

¹⁸Amplop adalah praktik korupsi dalam perspektif dunia jurnalistik.

minat pembaca akan menyusut atau berkurang.¹⁹ Kurang pembaca dari media cetak tersebut secara tidak langsung mengurangi pendapatan dari media cetak.

Pelanggan surat kabar Palopo Pos memiliki pandangan yang berbeda sekaitan dengan independen dari media cetak tersebut. Media cetak Palopo Pos selama memberitakan berita mengenai program- program pemerintahan cenderung ke arah positif tanpa melihat dari sudut pandang yang lain. Dengan kata lain, media cetak tersebut lebih cenderung memihak pemerintahan. Hal ini memberikan kesan bahwa pemerintahan kota Palopo dalam menjalankan program kerjanya berjalan dengan baik dan terkesan mengangkat nama Wali kota. Selain itu, sangat jarang diberitakan mengenai wakil dari wali kota. Terkesan wakil seperti tidak memiliki kegiatan sehingga jarang dimuat di koran Palopo Pos.²⁰ Sementara pelanggan ke dua berpendapat bahwa Palopo Pos selama memberitakan selalu sesuai dengan fakta yang terjadi. Selain itu, Palopo Pos cukup independen dalam memberitakan berita. Meski terkadang ada yang tidak sesuai, namun mayoritas memiliki kualitas baik dalam hal pemberitaan.²¹ Terlepas dari itu, kedua narasumber mengatakan bahwa Palopo Pos cukup bisa dikatakan sebagai koran yang menerapkan nilai-nilai netral dan independen. Koran Seru!YA yang dari awal didirikan salah satu untuk berbisnis, juga mendapat respon positif dari pelanggan. Media cetak tersebut cukup berperan dalam mengawal

¹⁹Sahar, *wawancara* pada tanggal 02 Oktober 2017.

²⁰Pelanggan 1, pegawai di kampus IAIN Palopo, *wawancara* pada tanggal 20 Februari 2018.

²¹Pelanggan 2, Dekan FTKIP IAIN Palopo, *wawancara* pada tanggal 20 Februari 2018

pemerintahan kota Palopo dan menjadi kontrol sosial. Selain itu, berita yang disajikan aktual dan faktual sam halnya dengan Palopo Pos. Kedua media cetak tersebut dapat dikatakan sangat memberikan informasi yang baik mengenai kebijakan-kebijakan pemerintahan bagi masyarakat serta bersifat transparan. Semua diberitakan berdasarkan fakta yang terjadi.²²

²²Pembaca, Sekretaris Lurah di kelurahan Pontap, *wawancara* pada tanggal 20 Februari 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab IV maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan Palopo Pos dan Seru!ya masing –masing berupaya dengan cara tersendiri dalam hal menjadi media yang netral dan independen. Keduanya tetap menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial dan menyampaikan informasi kepada masyarakat serta tergantung visi- misi didirikan media cetak tersebut.
2. Hambatan yang didapatkan untuk menjadi media yang netral dan independen yakni terkadang terjadi *missunderstanding* antara narasumber (mitra) dan wartawan atau perusahaan, komplain masyarakat terhadap berita yang diterbitkan tidak sesuai dengan perspektif masyarakat.
3. Efek yang ditimbulkan dari upaya yang dilakukan kedua media cetak tersebut untuk menjadi media yang netral dan independen terhadap keberlangsungan hidup wartawan dan perusahaan yakni perusahaan dan wartawan sulit untuk sejahtera. Karena, secara harfiah tidak ada media cetak yang independen. Media tersebut mesti menjalin kerjasama seperti, menerima iklan, kontrak dengan instansi atau lembaga baik pemerintahan maupun swasta dalam memperoleh pendapatan untuk gaji para wartawan dan karyawan perusahaan. Akan tetapi, agar tetap mendapat kepercayaan dari pembaca, media cetak meski menggunakan peluang tersebut secara bijak dalam artian di samping menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, media cetak tetap harus menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial.

B. Saran

Diharapkan kepada media cetak baik Palopo Pos maupun Seru!YA, untuk tetap mengaplikasikan kode etik jurnalis sebagai acuan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. UU pers no. 40 tahun 1999 pasal 3 ayat 2 tertera bahwa, fungsi pers sebagai lembaga ekonomi. Meskipun demikian, diharapkan peraturan tersebut tidak diartikan bebas dan tetap bijak dalam pengaplikasiannya. Selain itu, wartawan tidak hanya cukup berbekal dari pengalaman. Pendidikan bagi para wartawan sangat penting dan mempengaruhi kualitas dari berita yang ditulis. Oleh karena itu, media cetak mesti memperhatikan kualitas kinerja wartawan. Karena, kualitas berita dapat dilihat dari kinerja wartawan.

Sekaitan dengan kualitas berita yang dimuat oleh suatu media cetak, diharapkan kepada media cetak agar memperhatikan kualitas para wartawannya, dalam hal ini latar belakang pendidikan dan pengalaman. Misalnya, mengadakan pelatihan atau aktif dalam kegiatan jurnalistik, merekrut wartawan yang berasal dari disiplin ilmunya atau yang telah memiliki pengalaman, apalagi bagi media cetak yang masih dalam tahap perkembangan. Contoh lain, dengan mengadakan kerjasama dengan berbagai kampus untuk dijadikan tempat magang bagi mahasiswa pada disiplin ilmu yang berkaitan.

Bagi perguruan tinggi khususnya IAIN Palopo dalam hal ini fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam agar merelevankan antara materi kuliah dengan fenomena dilapangan. Karena, pada faktanya teori yang diterima dibangku perkuliahan jauh dari realitas. Selain itu, praktik dilapang mesti diseimbangkan antara teori yang diperoleh oleh mahasiswa, sehingga ketika mahasiswa terjun kelapangan pekerjaan, mereka mampu menerapkan teori yang telah diperolehnya. Dengan demikian, teori yang diperoleh dengan praktik

dilapangan dapat seimbang serta didukung dengan prasarana yang memadai, sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan lebih dalam lagi melalui metode Teknik Analisis Naratif terhadap teks berita. Di mana dalam penelitian tersebut, para peneliti menganalisis teks berita sesuai kategori yang dimaksud dalam penelitian misalnya, dari segi bahasa, kata, dan makna yang terkandung dalam suatu teks berita. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat meneliti seluruh berita kebijakan publik yang dimuat oleh media cetak. Karena, fokus penelitian ini hanya pada berita kebijakan publik dalam lingkup Palopo, dan masih banyak lagi metode –metode penelitian sosial yang dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Baran, Stanley J, “*Introduction to Mass Communication Media Literacy and Culture*”, diterjemahkan oleh Nurul Hasfi dengan judul *Pengantar Komunikasi Massa Melek Media dan Budaya*. Ed. V. Cet. XVIII. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2012.

Eriyanto. *Analisis Naratif Dasar-Dasar dan Penerapannya dalam Analisis Teks Berita Media*. Cet. II. Jakarta: Kencana. 2013.

Eriyanto. *Analisi Isi*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Kencana. 2011.

Fajar, Marhaeni, *Ilmu Komunikasi Teori & Praktik*. Cet. I. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Harsono, Andreas. *'Agama' Saya Adalah Jurnalisme*. Cet. V. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2014.

Sobur, Alex. *Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani*. Cet. I. Bandung: Humaniora Press. 2001.

Sukmono, Filosa Gita dan Fajar Junaedi. *Komunikasi Multikultur*. Cet. II. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta. 2014.

Sawitri, Sri. *Modul: Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Ed. II. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. 2014.

Taufiqurakhman. *Kebijakan Publik*. Universitas Moestopo Beragama.

Vivian, John, "The Media OF Mass Communication", diterjemahkan oleh Tri Wibowo B.S. dengan judul: *Teori Komunikasi Massa*. Ed. VIII. Cet. I. Jakarta: Prenada Media. 2008.

Media Online

<http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MAPU5301-M1.pdf>.

Pengertian kebijakan Publik. (18 April 2017)

N, Sora. *Pengertian Media Massa dan Menurut para ahli*. Diakses pada 10 September 2017 dari <http://www.pengertianku.net/2014/07/pengertian-media-massa-dan-menurut-para-ahli.html>.

Prihatiny, Nuramalina. *Pengertian Media Massa*. Diunduh pada 10 September 2017 dari http://www.kompasiana.com/nur.amalina22/pengertian-media-massa_550069dfa33315c73510b26.

Nuramalina Prihatiny. *Pengertian Media Massa*. Diunduh pada 10 September 2017 dari http://www.kompasiana.com/nur.amalina22/pengertian-media-massa_550069dfa33315c73510b26.

Suratmi, Elita. *Metode Kombinasi*. Diunduh pada 18 Oktober 2017 dari <http://elitasuratmi.wordpress.com/2013/03/11/metode-kombinasi>.

Artikel

Siregar, Amir Efendi dkk.. *Jurnal Menakar Independensi Media*. Ed. No.09 Juli 2014. Cet. 1. Jakarta: Dewan Pers. 2014

Sumber lain

Kurniawan,Eko. *Tesis: Studi Analisis Pemberitaan Media Massa Tentang Lingkungan Hidup Dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pengelola Lingkungan Di Kabupaten Bangka*, (Program Magister Pascasarjana universitas Diponegoro Semarang, 2006).

Yusuf, Jusnida. *Skripsi : Peran Palopo Pos Dalam Menyebarkan Informasi Tentang Program Pembangunan Pemerintah kota Palopo*. Palopo: Institut Agama Islam Negeri(IAIN). 2015.

BIODATA

LINDA MUSTIKA, lahir di Jawa Tengah, desa Banyuroto Kabupaten Kebumen pada tanggal 24 April 1993. Lahir dari pasangan Senaruddin dan Sukinah (almarhumah) dan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis menempuh jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar sempat di SDN 271 Labuangpatu kecamatan Tanasitolo kabupaten Wajo dan berpindah domisili sehingga, pendidikan dasar dilanjutkan di SDN 173 Lemah Abang, kecamatan Bone-Bone kabupaten Luwu Utara. Pada tahun 2005, penulis melanjutkan pendidikan di MTs. Al Falah dan tamat pada tahun 2008. Kemudian, melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Sukamaju dan tamat pada tahun 2011. Setelah itu, penulis melanjutkan ke perguruan tinggi pada tahun 2012 di STAIN Palopo yang kemudian beralih status menjadi IAIN. Mengambil disiplin ilmu pada program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah. Penulis membuat tugas akhir sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana, berupa skripsi yang berjudul **“Menakar Netralitas Dan Independensi Media Massa Terhadap Kebijakan Publik (Studi Kasus Surat Kabar Palopo Pos dan Koran Seru! YA).”**